

NEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Desember | Tahun 2023 No. 50

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



PKS



*PKS Tolak  
Kenaikan Biaya Haji:*

***Pemerintah  
Harus Berpihak  
pada Jamaah***

**H. WISNU WIJAYA, SE, MM.**

Anggota Komisi VIII DPR RI



# Kenaikan Biaya Haji dan Ketergesaan Pembuatan Undang-Undang

Kini peristiwa aneh dan anomali menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Sambil menunggu reaksi publik, situasi gaduh terulang kali disuguhkan. Mulai dari keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK), Revisi Undang-Undang Ibukota Negara (IKN) yang 'seumur jangung', hingga revisi Undang-Undang Cipta Kerja—semua dilakukan dengan menabrak nalar publik dan mendiskreditkan esensi demokrasi.

Sebuah ironi besar menyelimuti kebijakan pemerintah Penetapan Biaya Haji. Dua kali kenaikan biaya haji dirumuskan dalam setahun, kenaikan terjadi tahun di 2023 dan bahkan tahun 2024 mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah. Namun, yang lebih mencengangkan, adalah bagaimana keputusan ini ditetapkan—dengan tertawa gembira dan seloroh yang nyaris menegaskan keberadaan.

Di sisi lain, Proses pembuatan undang-undang

menjadi seperti perenang yang centangnya tak pernah berhenti. Disahkan, direvisi, kemudian disahkan kembali. Semua itu terjadi dengan kecepatan yang luar biasa, dikejar oleh nafsu dan kehendak. Ironisnya, kecepatan diterapkan dalam pembuatan kebijakan, namun kekaburan dan keraguan dalam proses implementasinya. Lihat saja bagaimana kabar investor yang on - off untuk menanamkan modalnya di IKN. Hilang tersapu isu yang saling bertinidhan.

Kini peristiwa aneh dan anomali menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Sambil menunggu reaksi publik, situasi gaduh terulang kali disuguhkan. Mulai dari keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK), Revisi Undang-Undang Ibukota Negara (IKN) yang 'seumur jangung', hingga revisi Undang-Undang Cipta Kerja—semua dilakukan dengan menabrak nalar publik dan mendiskreditkan esensi demokrasi.

Sorotan terakhir tertuju

pada perancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, terutama pada Pasal 10 yang menegaskan bahwa proses penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur akan ditentukan langsung oleh Presiden.

Kebijakan ini tidak hanya meminggirkan peran masyarakat dalam memilih pemimpinnya, tetapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.

Melalui kenaikan biaya haji yang diterapkan tanpa empati dan kebijakan-kebijakan lain

yang melibas nilai-nilai demokrasi, pemerintah tampaknya telah mengambil jalur ugaltugalan dalam menyusun kebijakan. Ini adalah panggilan bagi kita sebagai masyarakat untuk mempertanyakan dan menjaga integritas nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjadi landasan negara, sekaligus mengingatkan bahwa kebijakan seharusnya dibentuk untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan sempit yang hanya menguntungkan segelintir orang.

# PKS Tolak Kenaikan Biaya Haji, Minta Pemerintah Lebih Efisien dan Berpihak Kepada Jamaah

Jakarta (27/11) — Fraksi PKS DPR RI menolak dengan tegas BPIH tahun 1445 H/2024 yang disepakati oleh Panja Haji dengan pemerintah yakni sebesar Rp.93.410.000 yang lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar Rp90.050.634 terdapat selisih sebesar Rp3.359.363

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya, saat rapat bersama antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Senin, (27/11).

Menurut Wisnu, Fraksi PKS DPR RI konsisten berpihak terhadap masyarakat dan keberlanjutan dana haji, yaitu dengan cara mendorong terwujudnya penyelenggaraan yang efektif dan efisien, tepat guna dan tepat sasaran, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi perundang-undangan yaitu UU No 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan UU No 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah.

"Fraksi PKS

menyampaikan rasa syukur, bahagia, dan apresiasi kepada semua rekan-rekan Anggota Panja BPIH di Komisi VIII DPR RI yang telah membahas BPIH dengan konstruktif. Sikap tersebut sejalan dengan sikap Fraksi PKS yang sejak pembicaraan awal terkait BPIH 2024 dengan Menteri Agama maupun dengan BPKH telah menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam menghadirkan pembelaan dan keberpihakan terhadap kepentingan jemaah haji dengan berorientasi kepada sustainability pembiayaan haji, dengan sejumlah catatan kritis konstruktif beserta solusi kami tawarkan," terang Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah I ini.

Fraksi PKS, kata Wisnu,

memahami betul terhadap permasalahan yang dihadapi terkait sustainability pembiayaan haji. Namun Fraksi PKS melihat bahwa BPIH sebesar Rp93.410.000 masih bisa diturunkan dengan cara mengefisiensikan berbagai macam komponen seperti penurunan biaya penerbangan, masyair, pemangkasan durasi haji serta meniadakan komponen yang tidak penting dan relevan dengan kegiatan penyelenggaraan haji. Karena itu, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan.

"Pertama, Fraksi PKS terus mendorong agar ke depan harga komponen penerbangan dapat disesuaikan dengan harga yang lebih wajar dan kompetitif serta meminta para stakeholder, mampu membuat terobosan yang bisa menghasilkan harga penerbangan yang lebih wajar dan kompetitif mengingat biaya penerbangan saat ini masih terlalu mahal. Kami mendorong agar layanan penerbangan dibuka untuk semua maskapai sehingga ada kompetisi yang bisa menghasilkan harga bersaing sekaligus bisa

memberi lebih banyak opsi atau tawaran bagi kita untuk memilih layanan yang lebih menjanjikan dan berkualitas. Di antaranya memilih maskapai penerbangan yang membebaskan biaya tiket kepada jemaah sesuai pemakainan," urai Wisnu.

Kedua, lanjutnya, Fraksi PKS konsisten meminta agar regulasi zonasi lokasi perhotelan/pemukiman dihilangkan mengingat aturan ini berdampak terhadap tinggi dan rendahnya harga hotel karena peluang kompetisi yang sehat bagi hotel-hotel setara menjadi sangat terbatas, akibatnya harga-harga hotel dalam zonasi menjadi mahal.

"Selain itu, hilangnya kebijakan zonasi akan

menghilangkan spekulasi yang mengambil keuntungan dengan tidak fair. Selain itu, menghilangkan zonasi juga berimplikasi pada efisiensi pembiayaan komponen bus sholawat yang sebenarnya cukup dibebankan kepada pihak hotel," ujarnya.

Ketiga, imbuh Wisnu, Fraksi PKS terus mendorong usulan agar durasi haji dipangkas dari 40 hari menjadi 30 hari. Sebab dengan pemangkasan durasi ini akan memberikan dampak secara multidimensional mulai dari biaya konsumsi, petugas haji, serta suasana psikologis jemaah dan pengurangan berbagai beban pembiayaan lain terkait yang

BERIKUTNYA >>>

Fraksi PKS, kata Wisnu, memahami betul terhadap permasalahan yang dihadapi terkait sustainability pembiayaan haji. Namun Fraksi PKS melihat bahwa BPIH sebesar Rp93.410.000 masih bisa diturunkan dengan cara mengefisiensikan berbagai macam komponen seperti penurunan biaya penerbangan, masyair, pemangkasan durasi haji serta meniadakan komponen yang tidak penting dan relevan dengan kegiatan penyelenggaraan haji. Karena itu, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan.

## PKS Tolak Kenaikan Biaya Haji, Minta Pemerintah Lebih Efisien dan Berpihak Kepada Jamaah

### « SEBELUMNYA

jika ditaksir bisa menghemat hingga ratusan miliar.

"Untuk itu, secara konkret, kami mengusulkan agar pemanfaatan bandara lama dan baru di Jeddah Arab Saudi lebih di optimalkan sehingga durasi pengangkutan jemaah lebih banyak hingga tidak menelan waktu hingga lebih dari 25 hari. Termasuk bandara alternatif di Thaif dan Yambo," pungkasnya.

Hal ini, kata Wisnu, tentu akan mendapatkan sambutan yang positif bagi Arab Saudi yang sedang menggalakkan wisatanya.

"Kami juga mendorong agar pemakaian berbagai bandara tersebut dapat terlaksana diperlukan negosiasi yang sungguh-sungguh dengan para pihak pemegang kebijakan di Arab Saudi, khususnya GACA," ujarnya.

Fraksi PKS, tambah Wisnu, telah berusaha maksimal memperjuangkan aspirasi jemaah sejak usulan BPIH diputuskan di rapat Panja BPIH.

"Seluruh rakyat Indonesia melihat dan mendengar bagaimana kami terus mencari jalan terbaik dengan mengedepankan kepentingan umat, bangsa,

dan negara terutama calon jemaah sebagai bentuk komitmen perjuangan FPKS agar pelaksanaan haji tahun 2024 tetap berjalan lancar, selamat, baik dan menjadi haji mabrur, dengan tetap memperhatikan hak-hak calon jemaah haji yang masih menunggu yang jumlahnya kurang lebih 5,3 juta jemaah," jelas Wisnu.

Dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi jemaah haji yang sudah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi, kata Wisnu, yang sebagian besar adalah kalangan masyarakat kelas menengah bawah, seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil, dimana mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa mendaftar haji.

"Sementara, jika mereka terpaksa harus menambah jumlah pembayaran hingga dua kali lipat, maka akan sangat memberatkan jemaah. Maka Fraksi PKS Menolak penetapan BPIH sebesar Rp93.410.000," tegas Wisnu.

"Kami berharap pemerintah bisa melakukan efisiensi dan negosiasi ulang dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat dicapai harga yang terjangkau, rasional, dan nyaman bagi jemaah," ungkapnya.

"Fraksi PKS memohon ampun kepada Allah SWT jika dalam upaya selama ini masih dipandang belum maksimal dan kami juga memohon maaf kepada seluruh jemaah yang akan berangkat tahun 2024 jika buah perjuangan kami dinilai belum memuaskan," tutur Wisnu.

Terakhir, Wisnu menambahkan, Fraksi PKS menyampaikan terima kasih, terutama pada Kementerian Agama yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji 2024 meskipun dengan sejumlah catatan.

"Begitupun halnya dengan stakeholder terkait di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan BPKH kami ucapkan terima kasih atas kerja samanya.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada masyarakat dan rekan-rekan media yang senantiasa mengawal, memberikan masukan, dan menyalurkan aspirasi kepada Fraksi PKS dalam ikhtiar memperjuangkan dan membela kepentingan jemaah di panja BPIH 2024," tutup Wisnu.



"Seluruh rakyat Indonesia melihat dan mendengar bagaimana kami terus mencari jalan terbaik dengan mengedepankan kepentingan umat, bangsa, dan negara terutama calon jemaah sebagai bentuk komitmen perjuangan FPKS agar pelaksanaan haji tahun 2024 tetap berjalan lancar, selamat, baik dan menjadi haji mabrur, dengan tetap memperhatikan hak-hak calon jemaah haji yang masih menunggu yang jumlahnya kurang lebih 5,3 juta jemaah,"

**H. WISNU WIJAYA, SE, MM.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI



# Fraksi PKS DPR RI Kunjungi Dewan HAM PBB Bahas Palestina

Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Jazuli Juwaini bersama Presiden Persatuan Cendekiawan Muslim, Dr. Salim Segaf Al-Jufri, mengunjungi Markas HAM PBB (OHCHR) membahas perdamaian dan Kemerdekaan Palestina. di Jenewa, Swiss, pada Kamis, 30/11/2023.





## Bangun Kemitraan dengan Confagricultura Italia Fraksi PKS DPR: Tingkatkan Partisipasi Generasi Muda di Sektor Pertanian

Roma (27/11) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melakukan kunjungan ke Roma Italia bertemu dengan Konfederasi Pertanian Italia Confagricultura dan Badan Pangan & Pertanian PBB (FAO) yang bermarkas pusat di Roma Italia pada Senin (27/11).

Delegasi Fraksi PKS dipimpin langsung Ketua Fraksi Jazuli Juwaini dengan mengikutsertakan para politisi muda PKS yang dipersiapkan untuk menjadi motor perubahan dalam sektor pangan dan pertanian.

Hadir menyertai Delegasi Fraksi PKS ini Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri yang memberikan sambutan pada kunjungan tersebut.

Dalam sambutannya, Dr. Salim mengatakan, PKS sangat konsen dan komitmen terhadap sektor pertanian karena Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam, kaya keanekaragaman hayati, dengan bentangan lahan yang sangat luas.

"Mayoritas penduduk Indonesia hidup di perdesaan. Kita ingin perdesaan kita maju, petani sejahtera, dan pertanian Indonesia menjadi sektor unggulan yang berkelanjutan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan kunjungan Fraksi ini dalam rangka diplomasi pertanian dengan menjalin kerjasama dengan mitra internasional.

Confagricultura adalah Confagricultura adalah asosiasi pertanian tertua dan terbesar di Eropa dengan jaringan profesional yang sangat luas. Pertemuan ini menjadi ajang tukar pikiran, saling belajar, sharing informasi dan membuka opportunity

pengembangan pertanian masing-masing negara.

"Ada banyak agenda dan topik yang kami bahas mulai dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, stabilitas harga komoditas, pertanian pariwisata, riset dan inovasi pertanian hingga upaya menumbuhkan semakin banyak petani milenial," ungkap Jazuli.

Menurut juru bicara Confagricultura pangan dan pertanian adalah sektor penting dalam suatu negara karena kebutuhan primer setiap masyarakat. Potensinya sangat besar karena tidak ada manusia yang berhenti mengkonsumsi makanan.

Keterlibatan anak muda penting untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian selain tentu saja keberlanjutan dari sektor pertanian yang menyejahterakan pelaku usahanya.

"Fraksi PKS konsen dan komitmen mendorong generasi muda untuk tampil menjadi penggerak pertanian modern



"Fraksi PKS konsen dan komitmen mendorong generasi muda untuk tampil menjadi penggerak pertanian modern dan inovatif di Indonesia. Untuk itu anak muda perlu membuka pengetahuan dan wawasan, salah satunya, dengan mempelajari sistem inovasi pertanian di negara-negara maju,"

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

dan inovatif di Indonesia. Untuk itu anak muda perlu membuka pengetahuan dan wawasan, salah satunya, dengan mempelajari sistem inovasi pertanian di negara-negara maju," pungkas Jazuli.



# Fraksi PKS DPR RI Datangi HAM PBB di Swiss Suarakan Kemerdekaan Palestina

Jenewa-Swiss (01/12) — Fraksi PKS DPR RI melakukan pertemuan dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Nada al Nashif di Jenewa Swiss Kamis, (30/11/2023).

Delegasi Fraksi PKS dipimpin oleh Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi Duta Besar Achsanul Habib dari PTRI Jenewa.

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kehadiran Fraksi PKS di KTHAM PBB merupakan bagian dari lawatan diplomasi parlemen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina yang sudah dua bulan ini digempur agresor Israel.

"Kehadiran Fraksi PKS juga bertepatan dengan Peringatan Hari Solidaritas Internasional PBB untuk Rakyat Palestina yang diperingati setiap tanggal 29 November," katanya.

Melalui momentum terse-

but, Fraksi PKS mengingatkan bahwa PBB masih berhutang janji kemerdekaan rakyat Palestina yang diserukan Majelis Umum PBB sejak tahun 1978 berdasarkan Resolusi PBB 32/40 B.

"Bahwa rakyat Palestina sampai detik ini belum mendapatkan hak-haknya, mulai hak paling dasar yaitu hak hidup yang aman dan damai, hak menentukan nasib sendiri, hingga hak kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayahnya yang dirampas paksa oleh Israel," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri dalam sambutannya mengatakan bahwa jaminan

hak asasi manusia dan keadilan adalah prioritas tertinggi dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi Indonesia, UUD 1945.

"Karenanya kami sangat prihatin dan bersedih dengan berbagai konflik, perang, penindasan, diskriminasi, bahkan penjajahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia terutama apa yang terjadi di Gaza Palestina 2 bulan ini," ungkapnya.

Menteri Sosial RI 2009-2014 ini berharap PBB dengan seluruh kewenangan dan otoritas yang dimiliki dapat melakukan intervensi

Pertama, untuk menghentikan kekerasan, pembunuhan, dan genosida rakyat tak berdos di Gaza Palestina

Kedua, untuk menegakkan HAM dan keadilan rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaannya.

Ketiga, untuk menginvestigasi Israel atas semua pelanggaran HAM, pelanggaran hukum humaniter, dan pengabaian berbagai konvensi serta resolusi PBB.

Keempat, untuk menegakkan hukum dan sanksi yang tegas atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel selama pendudukan tanah Palestina.

"Dunia harus menghentikan Israel atas segala bentuk aneksasi, okupasi, dan penjajahannya di wilayah Palestina. Sebaliknya,



PBB masih berhutang janji kemerdekaan rakyat Palestina yang diserukan Majelis Umum PBB sejak tahun 1978 berdasarkan Resolusi PBB 32/40 B. Bahwa rakyat Palestina sampai detik ini belum mendapatkan hak-haknya, mulai hak paling dasar yaitu hak hidup yang aman dan damai, hak menentukan nasib sendiri, hingga hak kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayahnya yang dirampas paksa oleh Israel,"

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

bangsa Palestina harus mendapatkan hak kemerdekaannya di tanahnya sendiri. Inilah solusi

perdamaian yang harus kita wujudkan bersama," pungkas Dr. Salim.

# Fraksi PKS DPR RI ke Markas FAO Bawa Misi Kedaulatan Pangan

Italia (30/11) — Fraksi PKS DPR melakukan kunjungan resmi ke Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO PBB) di Markas Besar FAO Roma Italia (28/11/2023).

Delegasi dipimpin langsung Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri sebagai penasehat, Ketua Fraksi Jazuli Juwaini, serta sejumlah politisi muda PKS.

Fraksi PKS diterima oleh Direktur Kemiteraan dan Kolaborasi FAO Marcela Villarreal, Kepala Perwakilan FAO di Indonesia Rejendra Aryal, Kepala Unit Keterlibatan Pertanian Keluarga dan Jaringan Parlemen Guilherme Brady, Penanggung Jawab Investasi, Pembelajaran dan Informasi Ilmiah Pertanian FAO Andrew Nadeau, serta pejabat lainnya.

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri dalam sambutannya di pertemuan tersebut mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara besar memerlukan desain kebijakan dan program pembangunan

pertanian yang lebih baik dan berkelanjutan. Untuk itu, PKS hadir di Markas Besar FAO.

"Kami di PKS komit terhadap isu dan kebijakan pangan dan pertanian karena mayoritas rakyat kami hidup di pedesaan. Kami ingin pedesaan dengan karakter pertanian pangan, perkebunan, dan perikanan bisa produktif dan sejahtera. Untuk itu, kami siap mengawal kebijakan di parlemen dan menginstruksikan kepada kepala daerah di berbagai wilayah," ungkap Menteri Sosial RI 2009-2014 ini.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa kunjungan internasional yang sudah kesekian kalinya dilakukan Fraksi PKS ini dilakukan dalam rangka diplomasi parlemen. Kali ini ke lembaga-lembaga internasional

yang berhubungan dengan misi kedaulatan pangan nasional.

"FAO adalah organisasi internasional yang strategis kontribusinya dalam mengatasi persoalan pangan, gizi, nutrisi dan pembangunan berkelanjutan di dunia. Fraksi PKS mengapresiasi program yang selama ini dijalankan di Indonesia khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, mengatasi kelaparan, stunting, dan mengembangkan sektor pertanian," papar Jazuli.

Fraksi PKS punya misi bukan hanya ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan nasional karena dengan potensi yang dimiliki Indonesia baik dari potensi luasan lahan, kesuburan, iklim, maupun sumber daya manusia produktif, Indonesia sangat mungkin menjadi lumbung pangan nasional bahkan dunia.

"Kami berharap FAO terus mensupport program pangan dan pertanian di Indonesia agar misi tersebut bisa terwujud dan menjadi bagian solusi untuk mengatasi krisis pangan dan kelaparan di berbagai wilayah dunia," harap Jazuli.

Marcela Villarreal dari FAO menyambut baik kehadiran Fraksi PKS di Markas Besar FAO dan menyatakan bahwa kerjasama dengan parlemen adalah bagian penting dan strategis dari upaya global mengatasi krisis pangan dan kelaparan di dunia. Dia melihat Indonesia adalah negara



"Kami berharap FAO terus mensupport program pangan dan pertanian di Indonesia agar misi tersebut bisa terwujud dan menjadi bagian solusi untuk mengatasi krisis pangan dan kelaparan di berbagai wilayah dunia,"

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

penting dan negara terbesar di kawasan dalam mensukseskan agenda global tersebut.

Sementara menurut Kepala Perwakilan FAO di Indonesia Rejendra Aryal Indonesia adalah contoh sukses dari pelaksanaan program pertanian khususnya dalam pertanian keluarga atau family farming. Dimana keberhasilan Indonesia akan dijadikan FAO sebagai model bagi negara-negara lain.

Ke depan, Jazuli Juwaini yang juga Anggota DPR Dapil Banten, berharap FAO bisa berkontribusi lebih nyata bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Karena dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja menghadapi ancaman perubahan iklim, bencana, konflik dan perang yang menyebabkan krisis pangan dan kelaparan di berbagai belahan dunia.



## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

# Soal Kebocoran Data KPU, Komisi I FPKS: Ini Malapetaka!

Jakarta (02/12) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menyikapi sekitar 204 juta data pemilih di KPU yang kembali bocor. Kali ini diduga dilakukan oleh 'Jimbo'. Tahun lalu data KPU pun juga pernah bocor oleh 'Bjorka'.

Data-data itu, imbuhnya, dijual di darkweb dengan harga 74.000 dollar Amerika atau sekitar Rp 1,2 miliar. Data yang bocor meliputi NIK, No. KK, nomor KTP (berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi menyatakan di media bahwa data yang bocor itu data biasa data KPU.

"Ini malapetaka untuk rakyat dan demokrasi. Kok malah dibilang data biasa. Kita

sudah mengesahkan UU PDP tahun 2022 lalu. Kita anggap sangat urgent UU PDP saat itu, karena kebocoran data terus terjadi. Kita anggap kejadian-kejadian tersebut berbahaya untuk bangsa kita. Pernyataan pak Menteri seolah menyepelekan hal itu. Peretasan sistem elektronik yang dimiliki lembaga pemerintah dan kebocoran data pribadi itu sangat bahaya. Bukan hanya terkait motif ekonomi, tapi ini bisa mengacaukan proses Pemilu 2024," jelas Sukamta.

Sukamta yang dulu juga sebagai anggota Panja RUU PDP ini menambahkan bahwa dalam UU PDP Pasal 1 data Pribadi didefinisikan sebagai

data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

"Data KPU yang bocor itu cukup lengkap, mulai dari NIK sampai nomor KK. Jelas ini masuk kategori data pribadi, karena bisa mengidentifikasi seseorang. Lebih spesifik lagi ini masuk dalam kategori data pribadi yang bersifat umum. Sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi dan bisnis. Terlebih bila data yang bocor adalah data yang dikelola oleh lembaga publik, potensi dampaknya bisa mengganggu penyelenggaraan negara," katanya.

Karena itu, Wakil Rakyat dari Yogyakarta ini, menekankan dua hal. Pertama, pejabat publik dalam hal ini Menteri Kominfo, jangan membuat pernyataan yang kontraproduktif dan terkesan menyepelekan apa yang selama ini sudah kita upayakan, yaitu perlindungan data pribadi dalam bentuk UU.

"Kedua, pemerintah segera menyelesaikan peraturan-peraturan turunan dari UU PDP, khususnya Presiden harus segera menerbitkan Perpres tentang pembentukan lembaga otoritas pengawasan PDP agar segera bisa



"Ini malapetaka untuk rakyat dan demokrasi. Kok malah dibilang data biasa. Kita sudah mengesahkan UU PDP tahun 2022 lalu. Kita anggap sangat urgent UU PDP saat itu, karena kebocoran data terus terjadi. Kita anggap kejadian-kejadian tersebut berbahaya untuk bangsa kita.

**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Komisi I DPR RI

melakukan fungsi pengawasan perlindungan data pribadi. Jangan sampai UU ini tumpul

karena badan penyelenggaraanya belum ada," tutup Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.



## Soal Pengungsi Rohingya, Nasir Djamil Minta Pemerintah Berikan Perhatian Serius

Jakarta (22/11) — Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly

secara langsung menyampaikan permasalahan pengungsi Rohingya yang terus berdatangan di beberapa titik pesisir Aceh seperti Sigli, Aceh Utara, Bireuen di Provinsi Aceh.

“Dulu masyarakat Aceh pernah menerima pengungsi Rohingya dengan tangan terbuka, tapi kini masyarakat menilai ada sesuatu yang ganjil dan banyak hal yang tidak diinginkan terjadi hingga menyeret beberapa warga kami (Aceh) yang ikut terlibat dalam kasus perdagangan manusia,”

### **H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**

Anggota Komisi III DPR RI

Rapat yang turut di dampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023) tersebut menjadi momentum bagi Nasir mengutarakan aspirasi masyarakat setempat yang merasa gamang dalam menghadapi permasalahan pengungsi Rohingya.

“Dulu masyarakat Aceh pernah menerima pengungsi Rohingya dengan tangan terbuka, tapi kini masyarakat menilai ada sesuatu yang ganjil dan banyak hal yang tidak diinginkan terjadi hingga menyeret beberapa warga kami (Aceh) yang ikut terlibat dalam kasus perdagangan manusia,” ucap Nasir dalam rapat di ruang Komisi III DPR-RI itu.

Pada kesempatan tersebut Nasir mengungkapkan ada seribu lebih pengungsi Rohingya di Aceh.

Nasir meminta melalui

Menkumham untuk bisa menyampaikan perihal Rohingya ini kepada Pemerintah. Kiranya penolakan kedatangan Rohingya di Aceh bisa menemukan solusi yang lebih baik seperti memindahkan para pengungsi tersebut ke tempat yang memungkinkan dan aman.

Nasir Djamil menyisipkan perhatiannya di hadapan Menkumham untuk bisa menegur pihak organisasi kemanusiaan seperti IOM dan UNHCR yang bertugas di Aceh dalam penanganan pengungsi Rohingya agar lebih serius dalam membantu permasalahan migrasi ini dan bantuan kemanusiaan lainnya.

“Bukan masyarakat Aceh tidak menerima melainkan tolong kepada Pemerintah serius dalam menangani permasalahan Rohingya secepatnya bisa dipindahkan saja” tutupnya.



Sedimentasi Waduk Gajah  
Mungkur Berisiko Sebabkan Banjir,

## Aleg PKS Minta Kolaborasi Pengerukan

Wonogiri (01/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hamid Noor Yasin menanggapi tumpukan air dan usia Waduk Gajah Mungkur (WGM) Wonogiri yang terus berkurang karena sedimentasi yang terjadi dari tahun ke tahun di daerah aliran sungai (DAS).

Waduk yang diresmikan tahun 1981 ini, kata Hamid, masa pakainya diperkirakan tinggal 26 tahun dari 95 tahun yang direncanakan.

"Pada awal beroperasi, volume tampungan air WGM mencapai 560 juta meter kubik dengan volume efektif mencapai 440 juta meter kubik, namun sekarang berkurang menjadi lebih dari 100 juta meter kubik," imbuhnya.

Sedimen yang masuk ke WGM sebanyak sekitar 3,2 juta meter kubik per tahun atau seluas lapangan sepak bola dengan ketinggian 300 meter, lanjut Hamid, disumbang oleh

setidaknya tujuh daerah aliran sungai, yakni DAS Keduaung yang terbanyak (40%), disusul DAS Wiroko sebesar 16%.

"FPKS mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR telah menyediakan infrastruktur seperti pembuatan check dam (bendungan kecil) dan closure dike (penahan sedimentasi)," jelas Anggota Komisi V DPR RI ini.

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah IV ini menambahkan, ebanyak 12 seri check dam telah dibangun di DAS Bengawan Solo, sedangkan

closure dike juga dibangun di Sungai Keduaung.

"Selain itu, upaya meminimalkan sedimentasi ini terus dilakukan dengan cara konservasi, terutama di hulu DAS," tegas Hamid.

Sayangnya, kata Hamid, konservasi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh di sepanjang DAS itu karena di beberapa lokasi DAS, warga memanfaatkan lahan untuk aktivitas perekonomian.

"Berkurangnya pohon di hutan dan di sepanjang DAS Wiroko juga menyebabkan resapan air berkurang. Akibatnya tanah dan lumpur turun ke sungai sehingga memperparah terjadinya sedimen," ungkap Anggota BURT DPR RI ini.

Untuk menanggulangi, imbuhnya, telah dilakukan pengerukan sedimen di sekitar intake WGM meski dengan menggunakan ekskavator milik Perum Jasa Tirta I (PJT I), selaku pengelola waduk.

"Sedangkan kapal penyedot lumpur alias kapal keruk (dredger) yang masih ada di WGM adalah aset kepunyaan BBWS Bengawan Solo," pungkasnya.

Oleh karena itu, tegas Hamid, FPKS meminta adanya kolaborasi antara PJT I dan BBWS Bengawan Solo untuk melakukan pengerukan sedimen di WGM sebagai persiapan menghadapi musim hujan pada 2023-2024 agar tidak terjadi risiko banjir seperti



"FPKS mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR telah menyediakan infrastruktur seperti pembuatan check dam (bendungan kecil) dan closure dike (penahan sedimentasi),"

**Drs. HAMID NOOR  
YASIN, M.M.**

Anggota Komisi V DPR RI

pada bulan Februari 2023 lalu yang berdampak pada lima kabupaten/kota Solo Raya.

"FPKS juga meminta agar permasalahan sedimentasi setiap tahun di WGM ini dapat dikaji tuntas solusinya dengan Pemerintah Pusat duduk bersama Pemerintah Daerah dan

pada ahli di bidang sungai," ujarnya.

FPKS juga, tutup Hamid, meminta agar berbagai solusi lainnya perlu ditemukan dan dikaji. Pengerukan mungkin bukan solusi utama, tapi tidak bisa juga dengan hanya melakukan konservasi di hulu DAS.



## LRT Jabodebek Kerap Alami Gangguan, Aleg PKS: Kemenhub Harus Temukan Solusi Jangka Panjang

Tasikmalaya (22/11) — Anggota komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Toriq Hidayat menyebutkan bahwa Layanan LRT Jabodebek telah menjadi bagian penting dari mobilitas di wilayah Jabodetabek.

Hal ini disampaikan sesaat setelah mengikuti Raker RDP Komisi V DPR RI Bersama KemenPUPR, Kemenhub, BMKG, BNPP dan Korlantas Polri (21/11/2023).

“Sejak diresmikan, jumlah pelanggan terus meningkat.

“Sebaiknya Kemenhub memang harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki pengalaman dibidangnya. Demi memperbaiki kinerja layanan. Kami berharap agar akar masalahnya dapat segera ditemukan, apalagi jika Kemenhub sudah menggandeng konsultan internasional,”

### **KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi V DPR RI

Perkiraan Kami akan ada lonjakan pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti. Namun, beberapa kendala teknis baru-baru ini telah menghambat keberlangsungan layanannya. Terutama waktu tunggu yang lama,” ujar Toriq.

Menurut Politisi PKS asal Daerah Pemilihan Tasikmalaya dan Garut, memenuhi janji bahwa LRT akan beroperasi penuh pada Desember 2023 memang penting. Namun akan lebih baik lagi bila Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menyelesaikan banyak masalah dalam pengoperasiannya.

“Dengan menambah trainset dari 8 yang beroperasi saat ini bisa memperkecil waktu tunggu. Kemudian menemukan akar masalah roda-roda yang cepat terkikis (aus). Karena ini terkait dengan keselamatan

pengguna jasa. Solusi yang didapatkan harus mampu menjaga ketahanan komponen dalam waktu lama,” tutur Toriq.

Baginya tak masalah bila Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub menggandeng konsultan internasional, Systra, guna mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini bukti bila otoritas LRT Jabodebek bekerja cepat guna mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

“Sebaiknya Kemenhub memang harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki pengalaman dibidangnya. Demi memperbaiki kinerja layanan. Kami berharap agar akar masalahnya dapat segera ditemukan, apalagi jika Kemenhub sudah menggandeng konsultan internasional,” tutup Toriq.



## Aleg PKS Tegaskan Perlunya Perluas Pasar Ekspor Tak Hanya ke Cina, India, dan Amerika Serikat

Jakarta (28/11) — Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mendorong Kementerian Perdagangan untuk dapat meningkatkan kinerja ekspor, utamanya dalam ekspor barang nonmigas.

Amin menilai, kinerja ekspor nonmigas sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan dengan memperluas negara tujuan ekspor.

"Dari catatan data yang kami dapat, kinerja ekspor nonmigas menuju bulan

“Kami ingatkan juga bukan saja ke Kemendag, bagaimana UMKM ini bisa dilibatkan di tengah lesunya UMKM dalam pasar dalam negeri. Kita berharap ada kemitraan pengusaha-pengusaha besar atau menengah yang bisa melakukan ekspor untuk menggandeng UMKM. Lagi-lagi ini butuh koordinasi atau kolaborasi antar kementerian/lembaga,”

**AMIN AK, M.M.**

Anggota Komisi VI DPR RI

Oktober itu kita apresiasi Pak. Tapi catatan kami 45,63 persennya ya hanya ke tiga negara Pak ya Cina, India, Amerika Serikat. Nah ini pertanyaan saya bagaimana meningkatkan kinerja ekspor ke negara-negara lain, tentu saja agar tidak didominasi di tiga negara itu?" tanya Amin dalam Raker dengan Mendag Zulkifli Hasan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Lebih lanjut, Amin juga mendorong Kemendag lebih melibatkan UMKM maupun pengusaha lokal dalam hal ekspor. Hal tersebut guna mendorong UMKM semakin naik kelas.

Amin pun berharap Kemendag menggandeng kementerian/lembaga lain untuk bersama menggiatkan kembali UMKM yang ada.

"Kami ingatkan juga bukan saja ke Kemendag, bagaimana UMKM ini bisa dilibatkan di tengah lesunya UMKM dalam pasar dalam negeri. Kita berharap ada kemitraan pengusaha-pengusaha besar atau menengah yang bisa melakukan ekspor untuk menggandeng UMKM. Lagi-lagi ini butuh koordinasi atau kolaborasi antar kementerian/lembaga," harap Politisi Fraksi PKS ini.

# Aleg PKS Minta Kepastian Kelancaran Distribusi BBM Subsidi Jelang Natal dan Tahun Baru

Padang (27/11) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, pada saat kunjungan kerja (kunker) ke Sumatera Barat pekan lalu, meminta kepastian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah ini.

Anggota Komisi VI ini menyampaikan keprihatinannya terkait dengan kejadian langganan setiap tahun, yakni jebolnya kuota BBM bersubsidi. Sebagai informasi, pada tahun 2021 terjadi koreksi kuota sebesar 9.033,78 kiloliter setelah ditemukannya penyelewengan distribusi.

Di tahun 2022, kuota BBM subsidi jebol pada Oktober-November, dan pada tahun 2023 ini, proyeksi habisnya kuota Solar bersubsidi sebelum akhir tahun menjadi perhatian serius.

"Sebagaimana yang kita ketahui, jebolnya kuota BBM bersubsidi tiap tahun, telah menjadi perhatian serius bagi kita semua. Kejadian pada

tahun 2021 dan 2022 harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Oleh karena itu, hari ini kami dari anggota Komisi VI DPR hadir di sini untuk menggali lebih dalam dan mencari solusi bersama agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang," tutur Nevi.

Sejumlah pertanyaan pun diajukan oleh Nevi Zuairina terkait tindakan yang akan diambil oleh Pertamina terhadap pelanggaran penyaluran BBM subsidi. Ia menyoroti pentingnya tindakan tegas agar efek jera dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

"Kami juga mendesak Per-

tamina untuk lebih melibatkan masyarakat dan institusi setempat dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi. Skema pelaporan yang melibatkan reward bagi masyarakat yang berani melaporkan penyimpangan dianggap perlu untuk dioptimalkan. Dalam era teknologi informasi yang berkembang pesat, kami yakin pengontrolan terhadap kebijakan-kebijakan BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran dan tepat waktu", tegas politisi PKS ini.

Anggota DPR Dapil Sumbar II ini menginginkan, Pertamina untuk lebih melibatkan masyarakat dan institusi setempat dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi. Skema pelaporan yang melibatkan reward bagi masyarakat yang berani melaporkan penyimpangan dianggap perlu untuk dioptimalkan.

Pertamina juga diminta menjelaskan reaksi masyarakat terhadap penyetopan supply BBM subsidi dan bagaimana pengelolaan antrian di SPBU. Selain itu, hasil penginputan data konsumen kendaraan bermotor roda empat dalam menggunakan Peralite juga menjadi fokus pertanyaan.

"Sehubungan dengan wacana penghapusan Peralite yang menjadi isu sensitif, kami mengingatkan Pertamina untuk tidak menyampaikan wacana yang dapat meresahkan masyarakat tanpa melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk DPR. Penghapusan Peralite



"Kami juga mendesak Pertamina untuk lebih melibatkan masyarakat dan institusi setempat dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi. Skema pelaporan yang melibatkan reward bagi masyarakat yang berani melaporkan penyimpangan dianggap perlu untuk dioptimalkan.

**Hj. NEVI ZUAIRINA**

Anggota Komisi VI DPR RI

bukan hanya menjadi masalah teknis, namun juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19," pinta Anggota Banggar ini.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VI berharap

mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Pertamina, serta memberikan rekomendasi dan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi BBM bersubsidi di Sumatera Barat.

Selengkapnya kunjungi [fraksipar.pks.id](https://fraksipar.pks.id)



## Power Wheeling, Wakil Ketua FPKS: Langgar Konstitusi!

Jakarta (22/11) -- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menolak memasukkan skema power wheeling dalam RUU EBET yang digodok di Senayan.

Menurutnya, skema power wheeling berupa penggunaan bersama transmisi listrik PLN (open acces) oleh swasta, apalagi swasta asing, melanggar konstitusi yang mengamankan bahwa cabang-cabang usaha yang penting dan strategis seperti ketenagalistrikan ini dikuasai oleh negara.

"Transmisi listrik ini kan sangat strategis dalam pembangunan nasional termasuk pertahanan keamanan, sehingga harus dalam pengendalian negara dalam hal ini BUMN PLN. Bila sektor transmisi ini dilepas kepada pihak swasta, dikhawatirkan menjadi tidak terkendali", demikian dikatakannya dalam RAKER Komisi VII DPR RI, DPD RI dengan Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri LHK, Menteri PAN-RB, Menteri Perindustrian, Mendikbud-Ristek yang membahas RUU EBET, Senin (20/11/2023).

Ditambahkannya, sampai hari ini kita masih menganut sistem ketenagalistrikan yang terintegrasi (bundling) baik secara vertikal dari sisi pembangkitan, transmisi dan distribusi, maupun secara

horizontal, dari sisi wilayah usaha, yang kesemuanya dikuasai oleh negara.

"PLN kan bersifat monopoli sebagai single buyer dan single seller, apalagi transmisi listrik yang secara alamiah bersifat monopolistik," pungkasnya.

Dalam UU Ketenagalistrikan maupun dikuatkan oleh Keputusan MK, bahwa bidang ketenagalistrikan harus dikuasai negara dalam arti kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengusahaan dan pengawasan dilakukan oleh negara melalui BUMN. Sehingga tidak boleh diliberalisasi.

Swasta berperan ketika negara secara keuangan, SDM, atau teknologi masih belum mampu melaksanakan hal tersebut. Bukan ujug-ujug kita meliberalisasi sektor transmisi ini.

Mulyanto setuju untuk meningkatkan penggunaan listrik EBET menuju NZE, termasuk mengembangkan super grid transmisi antar pulau (Grid Nusantara) maupun smart grid sebagaimana direncanakan dalam RUPTL PLN 2024-2033, namun tidak meliberalisasi sektor transmisi listrik ini kepada pihak swasta, apalagi swasta asing.

"Sayang kalau gara-gara skema power wheeling tersebut RUU EBET yang sudah bagus ini mendapat penolakan dari masyarakat dan berujung di JR ke MK," katanya.

Sampai hari ini kita masih menganut sistem ketenagalistrikan yang terintegrasi (bundling) baik secara vertikal dari sisi pembangkitan, transmisi dan distribusi, maupun secara horizontal, dari sisi wilayah usaha, yang kesemuanya dikuasai oleh negara. PLN kan bersifat monopoli sebagai single buyer dan single seller, apalagi transmisi listrik yang secara alamiah bersifat monopolistik,

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**  
Anggota Komisi VII DPR RI



## Diah Nurwitasari Dorong Industri Gunakan Energi Baru dan Energi Terbarukan

Cirebon (15/11) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari mendorong para pelaku industri tanah air untuk menggunakan energi baru dan energi terbarukan (EBET/renewable energy) yang notabene ramah lingkungan dalam proses produksinya.

Hal itu disampaikan Diah saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII ke PT Long Rich Indonesia dan PT Kreasi Garment Cirebon, Jawa Barat.

"Dari dua industri di Cirebon Jawa Barat yang kami kunjungi hari ini. Keduanya mengaku sudah menggunakan energi baru dan energi terbarukan yang ramah

lingkungan. Meskipun persentasenya masih belum besar. Itu tentu sangat kami apresiasi," ujar Diah di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Meski demikian, lanjut Diah, kedua perusahaan tersebut mengakui bahwa, penggunaan renewable energy di kedua perusahaan tersebut sejatinya merupakan tuntutan pasar di Amerika dan Eropa.

Sebab, pasar di kedua negara maju tersebut meminta tiap produsen produk ekspor harus menggunakan green energy dari energi terbarukan.

Bahkan ada tuntutan secara global lewat kampanye-kampanye untuk masyarakat yang harus membeli produk yang mendukung green energy dan sebagainya.

Oleh karena itu Politisi dari Fraksi PKS ini mendorong terus penggunaan EBET pada sektor

"Dari dua industri di Cirebon Jawa Barat yang kami kunjungi hari ini. Keduanya mengaku sudah menggunakan energi baru dan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Meskipun persentasenya masih belum besar. Itu tentu sangat kami apresiasi,"

Dipl.Ing. Hj. **DAIH NURWITASARI**, M. I. POL.  
Anggota Komisi VII DPR RI

industri. Sehingga bukan hanya sekedar tuntutan pasar Eropa, melainkan juga kesadaran untuk mulai kembali pada energi yang bersih atau green energy.

Dalam kesempatan itu, PT Long Rich Indonesia memaparkan bahwa selama ini pihaknya menggunakan 40 persen energi terbarukan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang, Garut Jawa Barat. Sementara PT Kreasi Garment menggunakan solar atau panel surya.

"Namun, kami juga berharap pemerintah juga memberikan kemudahan, dalam hal harga. Jangan sampai karena dorongan kita menggunakan energi terbarukan pada sektor industri, tapi kemudian terjadi kenaikan harga produk yang dihasilkan. Ini pada akhirnya juga akan berimbas pada industri dan masyarakat luas," pungkasnya.

*Live*  
*Interactive*

Bersama  
Anggota  
Legislatif PKS



BERSAMA ARI PUTRA UTAMA



**Saksikan**  
**Setiap Jum'at**  
pk. 13.30 s.d 14.30 WIB





Basiswa Pesantren Dibuka

## HNW Apresiasi dan Ingatkan Kemenag Tak Diskriminatif pada Pesantren yang Diakui UU

Jakarta (25/11) — Anggota Komisi VIII DPR sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari FPKS, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan agar Kementerian Agama mengakomodir 3 jenis Pesantren yang sudah disahkan dalam UU Pesantren, pada penyaluran program dana abadi pesantren termasuk program beasiswa/beasantry.

HNW sapaan akrabnya mengingatkan, jangan sampai program beasiswa/beasantry yang bersumber dari dana abadi Pesantren yang mulai banyak direalisasikan Kemenag tahun ini, justru jadi persoalan baru di kalangan internal pengasuh tiga jenis Pesantren yang diakui oleh UU Pesantren.

“Saya mengapresiasi Kementerian Agama yang menindaklanjuti aspirasi kami agar dana abadi pesantren segera direalisasikan secara adil, di mana salahsatu bentuknya merupakan beasiswa untuk meningkatkan kualitas santri maupun pengasuh Pesantren tanpa membeda-bedakan. Kemenag harus pastikan seluruh Pesantren yang diakui dalam UU Pesantren, memperoleh informasi dan peluang yang sama dalam mengakses dan mendapat manfaat dari program beasiswa ini,” disampaikan Hidayat pada keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/11).

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini menjelaskan, dirinya menerima aspirasi dari kalangan Pesantren terkait Program non-gelar yang seleksinya sedang berjalan dalam bentuk Program Persiapan Beasiswa.

Pada booklet yang dikeluarkan Kemenag di situs resminya, ada teks yang timbulkan kesan bahwa baik di Persyaratan Umum maupun Persyaratan Khusus, Kemenag tidak menyebut semua jenis Pesantren yang sudah diakui oleh UU Pesantren.

“Sehingga sebagian pengasuh Pesantren dari jenis yang tidak disebut dalam pengumuman Kemenag itu jadi sangat khawatir adanga diskriminasi

atau tidak dilaksanakannya ketentuan UU Pesantren secara baik dan benar. Sehingga kalau itu dibiarkan, maka jika pun mereka mendaftarkan diri dan menyelesaikan proses administrasi, peluang untuk lolos mendapatkan beasiswa tersebut kecil, atau bahkan sejak awal diposisikan untuk tidak akan lolos administrasi,” ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mengutip UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, di Pasal 5 jelas disebutkan bahwa Pesantren terdiri atas Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning; Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

“Kemudian di Pasal 49 disebutkan bahwa Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren yang

BERIKUTNYA >>>

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini menjelaskan, dirinya menerima aspirasi dari kalangan Pesantren terkait Program non-gelar yang seleksinya sedang berjalan dalam bentuk Program Persiapan Beasiswa.

## Beasiswa Pesantren Dibuka, HNW Apresiasi dan Ingatkan Kemenag Tak Diskriminatif pada Pesantren yang Diakui UU

### « SEBELUMNYA

bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan, yang ketentuannya diatur di dalam Peraturan Presiden," imbuhnya.

Ketentuan itu dituangkan dalam Perpres Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Di pasal 23 tentang Dana Abadi Pesantren, hanya mengamanatkan agar dana tersebut digunakan untuk fungsi pendidikan Pesantren, dan tidak menyebut adanya penganak emasan satu jenis Pesantren dengan berlaku tidak adil pada jenis Pesantren lainnya.

"Artinya memang seluruh jenis Pesantren yang diakui oleh UU Pesantren, harusnya diberi peluang yang adil dan sama dalam pemanfaatan dana abadi pesantren, tidak boleh satupun jenis Pesantren yang diakui UU tapi malah diajarkan," sambungnya.

Hidayat masih berbaik-sangka, bahwa penerbitan booklet soal program beasiswa yang dipahami hanya fokus ke jenis Pesantren tertentu tersebut hanya perkara teknis di

kesekretariatan Kemenag saja, sehingga akan segera diperbaiki agar secara prinsip semua jenis Pesantren yang diakui UU akan tetap diakomodir dalam program beasiswa ini.

Namun, mispersepsi yang terbangun di sebagian kalangan pengasuh Pesantren, tetap harus diluruskan oleh Kemenag agar kondisi serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

"Oleh karena itu Kemenag harus menyampaikan klarifikasi dan koreksi, dan segera meningkatkan sosialisasi dengan menghadirkan perwakilan dari 3 jenis Pesantren yang diakui oleh UU Pesantren saat mengumumkan program beasiswa yang bersumber dari dana abadi Pesantren. Sehingga semua pihak merasakan adanya keadilan dan keterbukaan akses, hingga semakin termotivasi untuk mendaftarkan diri, mensukseskan program Kemenag, dan akhirnya bisa terjadi peningkatan kapasitas sumber daya di seluruh jenis Pesantren yang diakui dalam UU Pesantren," pungkasnya.



“Saya mengapresiasi Kementerian Agama yang menindaklanjuti aspirasi kami agar dana abadi pesantren segera direalisasikan secara adil, di mana salahsatu bentuknya merupakan beasiswa untuk meningkatkan kualitas santri maupun pengasuh Pesantren tanpa membedakan. Kemenag harus pastikan seluruh Pesantren yang diakui dalam UU Pesantren, memperoleh informasi dan peluang yang sama dalam mengakses dan mendapat manfaat dari program beasiswa ini,”

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI



## Wisnu Wijaya Desak Pemerintah Sisir Kembali Komponen BPIH untuk Biaya Haji yang Lebih Rasional

Jakarta (24/11) -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya menyatakan biaya haji 2024 berhasil diturunkan dari usulan awal Kemenag di angka Rp105 juta menjadi Rp 93,4 juta, bukan Rp94,3 juta.

Pihaknya meluruskan klaim Kementerian Agama yang sebelumnya menyebut penurunan biaya haji berada di angka Rp 94,3 juta sebagaimana kabar tersebut telah tersebar di banyak media.

Meski demikian, Wisnu mengatakan pihaknya masih belum puas dengan nilai penurunan tersebut karena masih terdapat sejumlah catatan.

"Pertama, kami tidak ingin jemaah kita hanya menerima nasi beserta kacang gosong yang tidak ramah lansia sebagaimana terjadi tahun lalu. Padahal, biaya yang dialokasikan cukup mahal saat itu, SAR 17,5 per jemaah. Untuk itu, kami menilai angka yang diusulkan saat ini senilai SAR 16,5 juga relatif masih tinggi. Padahal dengan SAR 10 saja, sebenarnya jemaah sudah bisa memperoleh nasi, sayur, beserta lauk pauk yang layak sebagaimana info ini kami peroleh langsung dari pengusaha catering di Arab Saudi," jelas Wisnu, Jumat (24/11).

Anggota Panja BPIH DPR RI ini mengungkapkan, jika

dilakukan penghematan pada komponen konsumsi saja, ada potensi penghematan hampir Rp 1 Trilyun.

"Untuk itu kami mendesak agar Kemenag kembali melakukan penyesiran dengan teliti. Karena setelah kami kalkulasi, ada potensi penghematan nyaris Rp 1 T. Itu baru dari komponen konsumsi saja," tegas Wisnu.

Selanjutnya, Legislator Fraksi PKS ini juga menyoroti kejanggalan atas berubahnya angka pada salah satu komponen BPIH 2024 dalam sekejap. Misalnya, Wisnu

menyoroti perbedaan angka yang sempat muncul pada komponen Biaya Penerbangan (PP) di Rapat Panja BPIH, Rabu 22 November 2023.

"Sebelum rapat kita scores pada Kamis 23 November 2023, pukul 17.18, pada lebaran yang diterima Anggota Panja, biaya komponen penerbangan (PP) tertera senilai Rp33.327.838,00. Namun kemudian ketika rapat kembali dimulai sekitar pukul 19.30, terdapat lebaran lain dengan angka pada komponen Biaya Penerbangan (PP) sebesar Rp33.427.838,00 atau naik Rp100.000,00 tanpa konfirmasi. Lengah sekejap, angka berubah," beber Wisnu.

Lebih lanjut, Wisnu juga mempertanyakan alasan syar'i kenapa jemaah diharuskan membayar full 1 kali tiket PP yang sama sekali tidak mereka pakai. Menurutny, jika dicek di

BERIKUTNYA >>>

Legislator Fraksi PKS ini juga menyoroti kejanggalan atas berubahnya angka pada salah satu komponen BPIH 2024 dalam sekejap. Misalnya, Wisnu menyoroti perbedaan angka yang sempat muncul pada komponen Biaya Penerbangan (PP) di Rapat Panja BPIH, Rabu 22 November 2023.

## Wisnu Wijaya Desak Pemerintah Sisir Kembali Komponen BPIH untuk Biaya Haji yang Lebih Rasional

### « SEBELUMNYA

aplikasi travelling, sebenarnya harga tiket Jakarta-Jeddah di bulan-bulan haji hanya berkisar di angka Rp15-16 juta (PP). Sementara pada komponen penerbangan BPIH (PP), biaya yang dibebankan per jemaah mencapai Rp33,4 juta atau dua kali lipat lebih mahal.

“Apa yang menjadi alasan syar’i seorang jemaah mesti membayar sesuatu yang tidak dia peroleh manfaatnya? Jika saja ini bisa ditekan sehingga jemaah hanya membayar 50% dari biaya penerbangan yang diusulkan Kemenag, atau hanya membayar sesuatu yang betul-betul mereka gunakan, maka angka yang bisa dipangkas dari beban pembayaran calon jemaah haji, baik per individu bisa berkurang sekitar Rp16 juta maupun kolektif sekitar (Rp16 juta x 241 ribu jemaah) Rp 3,8 T. Apalagi jika penerbangannya dilakukan dengan jumlah rombongan yang banyak, maka semestinya kita bisa peroleh diskon, bukan?” tegas Wisnu.

Wisnu menyatakan, selain pada komponen biaya

penerbangan, Wisnu menargetkan efisiensi pada komponen Khidmatul Masyair.

“Target kami pada rapat panja Senin 27 November 2023 adalah selain menekan biaya penerbangan, kami akan mendorong dilakukannya efisiensi pada komponen biaya Khidmatul Masyair. Yang awalnya ditawarkan Rp19 juta sekian kemudian berubah menjadi Rp17,7 juta. Kami meminta Kemenag tidak lagi memilih syarikat yang seharusnya di-blacklist, tetapi perlu dipilih mereka yang bisa menawarkan biaya di angka Rp13 juta, atau maksimal Rp15 juta. Target kami adalah tahun ini biaya haji tidak naik, bahkan perlu lebih efisien dibanding tahun sebelumnya,” lanjut Wisnu.

Anggota DPR Dapil Jateng 1 ini mengatakan, pihaknya berharap pemerintah bersedia kembali menyisir sejumlah komponen yang pihaknya usulkan guna menekan biaya haji hingga mencapai angka yang lebih rasional dengan tetap mempertimbangkan sustainability keuangan haji di masa mendatang.



“Target kami pada rapat panja Senin 27 November 2023 adalah selain menekan biaya penerbangan, kami akan mendorong dilakukannya efisiensi pada komponen biaya Khidmatul Masyair. Yang awalnya ditawarkan Rp19 juta sekian kemudian berubah menjadi Rp17,7 juta. Kami meminta Kemenag tidak lagi memilih syarikat yang seharusnya di-blacklist, tetapi perlu dipilih mereka yang bisa menawarkan biaya di angka Rp13 juta, atau maksimal Rp15 juta. Target kami adalah tahun ini biaya haji tidak naik, bahkan perlu lebih efisien dibanding tahun sebelumnya,

**H. WISNU WIJAYA, SE, MM.**

Anggota Komisi VIII DPR RI



## Dugaan Perbudakan Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit, Aleg PKS: Usut Sampai Tuntas!

Jakarta (24/11) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mendesak Polri agar mengusut tuntas dugaan terjadinya perbudakan di Perusahaan Perkebunan Sawit PT Bintang Sawit Lestari (BSL), Kalimantan Barat (Kalbar).

"Kasus ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Pastikan dilakukan secara transparan, sebab penganiayaan dan penyekapan atas pekerja tersebut adalah tindakan melanggar HAM," kata Netty dalam keterangan medianya, Jumat, (24/11).

"Negara harus hadir dalam setiap hubungan industrial yang terjadi. Jangan biarkan rakyat terjun bebas bertarung sendiri dalam upaya mencari penghidupan. Oleh karena itu, Kemnaker harus terlibat dalam menyelesaikan dugaan kasus penyekapan tersebut. Dampingi para korban hingga mendapatkan hak-haknya, apalagi ada dugaan pemotongan gaji pekerja yang tidak wajar,"

### **Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

Sebelumnya, sebanyak lima pekerja perkebunan kelapa sawit PT Bintang Sawit Lestari (BSL) di Kecamatan Sekadau Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar) diduga disekap dan dianiaya karyawan perusahaan. Mereka sebelumnya melarikan diri dari perkebunan karena mendapat perlakuan tidak adil, antara lain pemotongan gaji yang tak wajar.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sekadau Iptu Rahmad Kartono mengatakan, tujuh orang karyawan perusahaan telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Polri harus mengusut apakah ada intruksi dari atasan atau tidak. Pastikan semua yang terlibat harus diproses

hukum, jangan hanya yang level operator," tandas Netty.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengingatkan Kemnaker akan perannya dalam melindungi pekerja.

"Negara harus hadir dalam setiap hubungan industrial yang terjadi. Jangan biarkan rakyat terjun bebas bertarung sendiri dalam upaya mencari penghidupan," katanya.

Oleh karena itu, imbuh Netty, Kemnaker harus terlibat dalam menyelesaikan dugaan kasus penyekapan tersebut.

"Dampingi para korban hingga mendapatkan hak-haknya, apalagi ada dugaan pemotongan gaji pekerja yang tidak wajar," tambahnya.



Bagian dari Kekayaan Indonesia,

## Aleg PKS: Bahasa Nasional dan Daerah Bisa Saling Memperkuat

Jakarta (23/11) — Komisi X DPR mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bahasa Daerah untuk melindungi dan melestarikan bahasa daerah.

Walaupun begitu, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan bahasa daerah sebagai bagian dari kearifan budaya, tidak boleh saling meniadakan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi X DPR

baik Bahasa Indonesia maupun bahasa daerah bisa saling bersinergi karena bahasa tersebut yang membentuk jati diri bangsa. Harusnya saling menguatkan antara bahasa daerah, bahasa nasional. Jangan saling meniadakan karena bisa saling memperkaya, saling memperkuat, jadi tetap ada nilai-nilai yang bisa (menjadi) kekuatan bangsa Indonesia,"

### H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

Anggota Komisi X DPR RI

Mustafa Kamal dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Menurutnya, baik Bahasa Indonesia maupun bahasa daerah bisa saling bersinergi karena bahasa tersebut yang membentuk jati diri bangsa.

"Harusnya saling menguatkan antara bahasa daerah, bahasa nasional. Jangan saling meniadakan karena bisa saling memperkaya, saling memperkuat, jadi tetap ada nilai-nilai yang bisa (menjadi) kekuatan bangsa Indonesia," ungkap Mustafa.

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS itu mendukung bahasa daerah mendapatkan afirmasi pelajaran muatan lokal di

sekolah dasar dan menengah. Ia menilai membudayakan bahasa daerah perlu diusahakan dalam pendidikan, di mana perlahan-lahan akan membentuk identitas

"Identitas nasional itu dibangun dari identitas lokal di daerah, jadi tidak akan ada identitas nasional tanpa identitas lokal yang kuat. Indonesia ini terbentuk karena ditopang oleh kekuatan identitas lokal," imbuhnya.

Menutup pernyataannya, politisi Fraksi PKS itu berharap penyusunan RUU Bahasa Daerah bisa terselenggara secara kolaboratif.

Harapannya, RUU tersebut bisa menghasilkan regulasi yang komprehensif serta bisa dilaksanakan di berbagai lapisan stakeholder.



## Pemerintah Belum Kirim DIM, Komisi X FPKS: Tetap Siap Bentuk Panja RUU Bahasa Daerah

Jakarta (23/11) — Pimpinan DPR telah meneruskan Surat Presiden kepada Komisi X DPR untuk menyusun sekaligus membahas lebih lanjut Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah (RUU Bahasa Daerah).

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih menegaskan pihaknya belum bisa membahas lebih lanjut karena masih menantikan DIM RUU Bahasa Daerah dari pemerintah yang hingga kini belum diterima.

Walaupun begitu, dirinya

"Adanya rapat ini menunjukkan bahwa Komisi X sudah siap, bahkan kami siap membentuk panja (untuk RUU Bahasa Daerah). Hanya memang karena DIM dari pemerintah belum datang juga, maka kita rapat ini yang mana adalah untuk konsultasi,

**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

menekankan bahwa Komisi X DPR siap membentuk Panitia Kerja (Panja) guna membahas RUU tersebut bersama DPD RI bersama dengan Pemerintah. Pernyataan ini disampaikan saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama dengan DPD RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

"Adanya rapat ini menunjukkan bahwa Komisi X sudah siap, bahkan kami siap membentuk panja (untuk RUU Bahasa Daerah). Hanya memang karena DIM dari pemerintah belum datang juga, maka kita rapat ini yang mana adalah untuk konsultasi, artinya bahwa Komisi X DPR RI siap untuk segera membahas bersama," terang Politisi Fraksi PKS ini.

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

menyatakan bahwa terdapat 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia berada dalam kondisi rentan, kritis, bahkan hampir punah. Pada saat yang sama terdapat 11 bahasa sudah punah, di antaranya sejumlah bahasa daerah yang ada di Papua.

"Oleh karenanya, kalau ini dibiarkan saja dan tidak ada regulasi yang memaksa, maka tidak ada yang memayungi untuk konservasi atau perlindungan terhadap bahasa daerah ini," tandas legislator dari Dapil Jawa Tengah IX itu.

Selama Raker tersebut berlangsung, hadir pula Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim, Senator Komite III DPD RI wakil Banten Abdi Sumaithi, Senator Komite III DPD RI wakil Bali Anak Agung Gde Agung, dan Senator Komite III wakil Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa.



## Aleg PKS Tegaskan APPF Harus Perluas Peran Perdamaian di Dunia, Tidak Hanya Regional

Manila (27/11) — Anggota BKSAP dari Fraksi PKS Syaehrul Aidi MAAZAT berharap agar APPF (Asia Pasific Parliamentary Forum) mampu memiliki peran yang luas, tidak hanya berdampak pada negara yang berada di kawasan Asia Pasifik saja.

Hal ini disampaikan usai mengikuti salah satu agenda dalam Annual Meeting APPF ke-31, yakni Political and Security Matters Working Group.

“Tadi kita juga mendukung dan bekerja sama untuk menyampaikan bahwasanya forum ini tidak boleh egois

“Tadi kita juga mendukung dan bekerja sama untuk menyampaikan bahwasanya forum ini tidak boleh egois hanya memikirkan kawasan. Tetapi harus juga berkontribusi bagi perdamaian dunia, bagi penegakan hak asasi manusia di dunia, dan bantuan terhadap daerah atau negara-negara yang mereka itu tertinggal, atau terjadi pelanggaran hak asasi manusia,”

**Dr. H. SYAHRUL AIDI  
MAAZAT, Lc., M.A.**

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI

hanya memikirkan kawasan. Tetapi harus juga berkontribusi bagi perdamaian dunia, bagi penegakan hak asasi manusia di dunia, dan bantuan terhadap daerah atau negara-negara yang mereka itu tertinggal, atau terjadi pelanggaran hak asasi manusia,” jelas Aidi MAAZAT di Philippine International Convention Center, Filipina, Kamis (23/11/2023).

Aidi MAAZAT menyampaikan bahwa pernyataan itu tidak hanya keinginan dari delegasi Indonesia, melainkan juga disampaikan oleh negara Jepang dalam pasal draft resolusi usulannya bersama Chile, Rusia, Mexico, Australia, dan Filipina yang berjudul “Resolution on Strengthening The Capacity of

Parliaments to Promote Regional Peace and Stability.”

Aidi MAAZAT, yang juga merupakan Ketua GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral) Palestina juga berharap bahwa jika nantinya resolusi ini disetujui dan sukses pada pertemuan tahunan pada kali ini.

Maka negara-negara anggota APPF ini juga secara tidak langsung dapat berpartisipasi dalam membantu negara Palestina, yang saat ini menjadi korban kemanusiaan Israel.

“Saya kira seperti di Palestina, bantuan kemanusiaan harus sampai ke sana. Oleh negara-negara anggota APPF ini kepada negara-negara seperti Palestina,” tutup Aidi.



## Dialog Bilateral Parlemen dan Ulama Pakistan, Wisnu Wijaya: Kedamaian dan Keberagaman Perlu Disebarkan

Jakarta (01/12) -- Anggota Komisi VIII Fraksi PKS DPR RI, Wisnu Wijaya, menghadiri Pertemuan dengan Delegasi Ulama dan Pemuka Muslim Pakistan yang membahas mengenai Promosi Kerukunan antar Umat Beragama dan Islam Moderat di Indonesia di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, pada Jumat (1/12).

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, kata Mulyanto, Indonesia memiliki pengaruh besar dalam mencekamin citra Islam moderat dan berkontribusi dalam menjaga dan memelihara pandangan positif masyarakat dunia terhadap dunia Islam.

Pada pertemuan ini, Delegasi Ulama dan Pemuka Muslim Pakistan menceritakan mengenai kunjungan yang mereka lakukan ke beberapa organisasi islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, bahkan juga sempat mengunjungi beberapa pesantren.

Dalam kunjungan tersebut mereka menemukan bahwa Indonesia sangat berhasil menjadi negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia karena kerukunan umatnya, lebih dari itu mereka juga menanyakan bagaimana hal tersebut dapat dicapai sampai pada titik ini.

Hal tersebut kemudian dijawab oleh Wisnu Wijaya

dengan menjelaskan pokok-pokok fundamental yang dimiliki rakyat Indonesia sebagai pegangan berbangsa dan bernegara di kehidupan sehari-hari.

"Di Indonesia kami memiliki semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' yang menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Semboyan ini mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang tidak

terpisahkan" jelas Wisnu.

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah I tersebut juga menjelaskan bahwa kebersamaan dan menghormati sesama merupakan hal-hal yang terlihat kecil, namun harus dijaga keberadaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Perbedaan adalah sebuah keindahan. Kebersamaan dan menghormati sesama harus dijaga. Penanaman nilai kedamaian dan keberagaman juga harus dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga, sekolah, bahkan sampai di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat" tegas Wisnu.

Pertemuan ini ditutup dengan kedua belah pihak saling memberikan plakat dan cinderamata serta sesi dokumentasi.

"Perbedaan adalah sebuah keindahan. Kebersamaan dan menghormati sesama harus dijaga. Penanaman nilai kedamaian dan keberagaman juga harus dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga, sekolah, bahkan sampai di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat"

**H. WISNU WIJAYA, SE, MM.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

# PROGRAM UNGGULAN

## FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kecatif Atrokrakj Substantif*

**Parlementaria** ( Diskusi Publik,  
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,  
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



Pelantikan Forum Komunikasi  
Lembaga Pendidikan Al-Qur'an,

**Nevi: Komitmen  
Kuatkan Mutu  
Pendidikan Agama**

Padang Pariaman (01/12) — Anggota DPR RI asal Sumatera Barat II dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina pada acara pelantikan Forum Komunikasi Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (FK-LPQ) di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat,

menyampaikan bahwa Pelantikan FK-LPQ ini bukan hanya sebuah acara formal, melainkan simbol dari komitmen kita bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan agama di tanah air tercinta, khususnya di Sumatera Barat.

Politisi PKS ini mengatakan, acara pelantikan LPK yang berlangsung di Padang Pariaman, ini merupakan momen penting untuk mengukuhkan kepengurusan FK-LPQ yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an di wilayah tersebut.

Nevi Zuairina yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di daerahnya.

"Saya menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan Al-Qur'an dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia dan berkualitas. Apresiasi sebesar-besarnya saya sampaikan atas langkah-langkah yang telah diambil oleh FK-LPQ dalam menjalankan peran strategisnya dalam mendukung

pembangunan pendidikan di bidang keagamaan," tutur Nevi.

Anggota DPR RI Komisi VI ini sangat kagum pada keakraban para peserta dimana acara pelantikan ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, ulama, dan pejabat daerah.

"Keberadaan FK-LPQ diharapkan dapat menjadi wadah sinergi antara lembaga pendidikan Al-Qur'an dengan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan agama di Sumatera Barat," pungkasnya.

Nevi Zuairina kembali

"Keberadaan FK-LPQ diharapkan dapat menjadi wadah sinergi antara lembaga pendidikan Al-Qur'an dengan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan agama di Sumatera Barat,"

**HJ. NEVI ZUAIRINA**

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Sumatera Barat II

menyampaikan apresiasinya terhadap langkah-langkah konkret yang diambil oleh FK-LPQ dalam meningkatkan mutu pendidikan Al-Qur'an. Beliau berharap, dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, lembaga pendidikan Al-Qur'an dapat berperan aktif dalam membentuk generasi penerus yang cerdas, berakhlak, dan memiliki kedalaman spiritual.

"Saya yakin, dengan semangat gotong-royong dan integritas yang tinggi, FK-LPQ akan menjadi pelopor dalam mencetak kader-kader unggul yang menguasai ilmu agama serta memiliki keterampilan dan integritas yang tinggi. Mari kita bersama-sama bahu-membahu mewujudkan visi dan misi FK-LPQ untuk menciptakan pendidikan Al-Qur'an yang berkualitas dan merata di seluruh pelosok tanah air," tutup Nevi Zuairina.



## Hermanto: Tradisi Makan Bajamba, Perekat Masyarakat Sawahlunto

Padang (02/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I Hermanto menyebutkan tradisi Makan Bajamba terbukti menjadi perekat semua elemen masyarakat Kota Sawahlunto.

Terlebih lagi, kata Hermanto, budaya tersebut dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 1 Desember bertepatan dengan HUT Sawahlunto.

"Pejabat pusat hingga kepala desa, para tokoh dan masyarakat berbaur untuk makan bersama pada puncak HUT Kota Sawahlunto ke-135. Semua tampak bergembira. Simbol semua elemen kompak membangun Sawahlunto", ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (02/12).

Makan Bajamba, jelas Hermanto, merupakan tradisi makan besar secara bersama-sama. Tradisi ini terbukti berhasil merekatkan semua etnis yang tinggal di Sawahlunto.

"Sejarah panjang tambang batubara, mulai abad ke-17 hingga abad ke-20, membuat beragam etnis datang ke Sawahlunto. Kota ini menjadi tempat tinggal dan milik bersama berbagai etnis seperti Minangkabau, Jawa, Batak, Tionghoa, Sunda, dan lainnya", papar legislator dari FPKS DPR RI ini.

"Keragaman etnis tersebut tidak memicu kerenggangan. Keragaman itu, diantaranya karena tradisi makan bajamba, justru melahirkan keharmonisan pada setiap aspek kehidupan masyarakatnya", tambah Hermanto.

Tradisi ini diawali dengan kedatangan para perempuan membawa jamba atau nampun berisi berbagai jenis makanan yang dijunjung di atas kepala

masing-masing.

Begitu tiba, jamba itu diletakkan di atas karpet yang digelar di bawah tenda yang didirikan menutupi hampir semua sisi taman rumah Dinas Walikota Sawahlunto.

Makanan yang dibawa sesuai dengan makanan tradisional dari etnis masing-masing. Di warga etnis Minangkabau membawa makanan tradisional seperti rendang, gulai, dan lainnya.

Etnis Jawa menyiapkan tumpengan, jajan pasar, ingkung (ayam yang diolah dengan santan dan bumbu khas), dan semur tahu. Etnis Sunda menghidangkan nasi timbel, sambel terasi dan lalapan, pais tahu, gemplong, tempe tahu bacam, dan rujakan.

Bersama warga lainnya, para perempuan tersebut kemudian duduk berlesehan melingkari jamba atau makanan itu. Acara dihadiri perwakilan sepuluh nagari dari empat kecamatan, seluruh etnis yang ada, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sekolah, lembaga, dan beberapa perusahaan swasta di Sawahlunto bahkan ada yang berasal dari Malaysia.

"Masyarakat dari ranah dan rantau serta luar negeri terlihat berbaur dalam acara Makan Bajamba tersebut", pungkas Hermanto.

Disamping Hermanto, hadir juga Anggota DPR RI Darul Siska, istri Gubernur Sumbar



"Sejarah panjang tambang batubara, mulai abad ke-17 hingga abad ke-20, membuat beragam etnis datang ke Sawahlunto. Kota ini menjadi tempat tinggal dan milik bersama berbagai etnis seperti Minangkabau, Jawa, Batak, Tionghoa, Sunda, dan lainnya",

**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**  
Anggota Komisi IV DPR RI

Harneli Bahar, Penjabat Walikota Zefnihan, Kapolres AKBP Purwanto Hari Subekti,

Dandim Letkol Reno Handoko dan tokoh setempat Muksin Ferdian.



## Nasir Djamil Beri Tausiah dan Motivasi Bagi Ratusan Santri Huda Wannur

Kota Langsa (27/11) --- Pondok Pesantren (Ponpes) Internasional Huda Wannur Kota Langsa pimpinan Ustadz Al Hafiz kedatangan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, HM Nasir Djamil SAg MSi, Minggu (26/11/2023) malam.

Dalam silaturahmi di Aula Ponpes tersebut, Nasir Djamil memberikan tausiah Agama bagi ratusan santri agar termotivasi untuk lebih giat belajar sehingga dapat menjadi seorang Hafidz Al-Quran dan kedepannya bisa menempuh pendidikan ke Luar Negeri.

“Banyak wali santri juga mengharapkan adanya pendidikan tingkat SLTA. Oleh karena itu, kita terus melakukan pembangunan fisik, baik kelas belajar, Mesjid dan sarana lainnya”,

**H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nangroe Aceh Darussalam II

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS ini memberikan materi tausiah pendidikan kepada para santri terkait dengan motivasi belajar, tujuan dan arah menimba ilmu di Sekolah berbasis Agama.

Nasir Djamil berharap agar anak-anak santri bisa menjadi hafiz Al-Qur'an 30 juzz dan kedepannya bisa sekolah keluar Negeri apalagi sekolah Internasional yang luar biasa.

Dihadapan tokoh masyarakat, Nasir Djamil juga mengatakan, Insha Allah akan membantu terkait pengembangan fisik ruang belajar di Ponpes Huda Wannur.

Sementara itu, Pimpinan Ponpes Internasional Huda Wannur, Al Hafiz, dalam kesempatan tersebut menjelaskan sejarah terbangunnya sekolah Internasional yang dimulai sejak tahun 2020 diatas tanah wakaf Almarhum Abdullah Zakaria atau biasa disapa pak Dol.

“Bangunan Ponpes ini juga

merupakan sedekah dari jamaah pengajian dan masyarakat Kota Langsa serta Aceh lainnya”, jelasnya

Saat ini pihaknya mengaku bersyukur karena sudah ada santri sekitar 250 orang yang menempuh pendidikan tingkat SLTP.

“Banyak wali santri juga mengharapkan adanya pendidikan tingkat SLTA. Oleh karena itu, kita terus melakukan pembangunan fisik, baik kelas belajar, Mesjid dan sarana lainnya”, ungkap Al Hafiz di depan Nasir Djamil.

Silaturahmi Nasir Djamil dengan Pimpinan Ponpes International Huda Wannur, para Ustadz (guru) dan ratusan santri ini turut dihadiri Ketua Barisan Sahabat Nasir Djamil (Basabnas) Aceh, H Hasan Basri SH MH dan Pembina Basabnas, H Firmansyah SH MH yang juga Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Langsa (Permasa) domisili Banda Aceh.

Tanam 1 Juta Pohon

# Saadiah Uluputty Tegaskan Komitmen PKS dalam Pelestarian Lingkungan

Jakarta (29/11) — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mengukuhkan komitmennya terhadap isu lingkungan hidup dengan meluncurkan program penanaman 1 juta pohon.

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata partai dalam mendukung pelestarian lingkungan dan menghadapi perubahan iklim global dan juga dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMP) pada (28/11/2023) dan Bulan Menanam Pohon Nasional (BMPN) pada bulan Desember 2023.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Saadiah uluputty menyambut positif pelaksanaan program '1 Juta Pohon untuk Indonesia' ini.

Menurutnya Program ini dirancang sebagai respons terhadap keprihatinan akan deforestasi yang semakin meningkat dan dampak perubahan iklim yang merugikan.

"Partai Keadilan Sejahtera merasa tanggung jawab untuk

ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan. Program penanaman 1 juta pohon ini adalah langkah konkrit kami untuk memberikan kontribusi positif bagi Bumi kita," ungkap Saadiah.

Penanaman 1 juta pohon, imbuhnya, akan dilakukan di berbagai lokasi strategis di seluruh Indonesia. Tim khusus dari partai akan bekerja sama dengan komunitas lokal, pemerintah daerah, dan organisasi lingkungan untuk memastikan keberlanjutan program ini.

"Kami ingin melibatkan masyarakat secara langsung, membangun kesadaran akan pentingnya menjaga alam, dan memberdayakan mereka untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan," tambah Saadiah.

Selain tujuan utama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, kata Saadiah, program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal.

Melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan penanaman dan perawatan pohon diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Dalam konteks ini, PKS juga berencana untuk melakukan kampanye penyuluhan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup dan peran masyarakat dalam pelestariannya. Kampanye ini akan mencakup kegiatan edukasi di sekolah-sekolah, seminar, dan workshop di berbagai daerah," papar Anggota DPR RI dari Dapil Maluku ini.

Program '1 Juta Pohon untuk Indonesia' bukan hanya menandai komitmen PKS terhadap lingkungan, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun hubungan positif antara partai dan masyarakat.



“Kami ingin melibatkan masyarakat secara langsung, membangun kesadaran akan pentingnya menjaga alam, dan memberdayakan mereka untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan,”

## **SAADIAH ULUPUTTY, S.T.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

"Melibatkan partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat memperkuat keterlibatan mereka dalam proses politik dan pembangunan negara," ujarnya.

Partai Keadilan Sejahtera, lanjut Saadiah, mengundang seluruh elemen masyarakat, baik individu maupun kelompok, untuk bersama-sama

mendukung dan berpartisipasi dalam program ini

"Dengan kerjasama bersama, PKS yakin bahwa program penanaman 1 juta pohon ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan," tutup Saadiah.



# Rafly Kande Bawa Bantuan ke Camp Pengungsi Rohingya di Pidie Aceh

Kabupaten Pidie (22/11) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Rafly Kande mengunjungi imigran Rohingya yang terdampar di Desa Kulee, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Senin, (20/11/2023).

Pada kesempatan itu, Rafly menyerahkan bantuan berupa bahan makanan pokok dan makanan kemasan ke kamp para pengungsi.

Rafly menuturkan bahwa semua pihak harus melihat fenomena ini dari sisi kemanusiaan.

"Sebenarnya di bumi ini Allah jamin untuk kehidupan manusia. Oleh sebab itu, semua konsentrasi dunia dan pemerintah beserta seluruh stakeholder harus melihat dari sisi kemanusiaannya dulu," kata Rafly.

Pengungsi Rohingya didominasi anak-anak dan wanita menempuh jalan kaki ke Meunasah Gampong Kulee, sementara pemuda dan usia produktif ditempatkan di kemah tepat di

bibir pantai desa setempat.

"Di sini kita melihat bayi dan anak-anak kecil. Mereka ini bukan sengaja untuk berlayar dan bersusah payah, tetapi ada persoalan lain bahwa mereka itu susah mendapatkan kehidupan yang layak dan kehidupan yang baik di negeri sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Rafly, sesama muslim harus melihat kejadian ini dari sisi kemanusiaan. Ia berharap, pemerintah juga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

"Oleh sebab itu, kita harus respons dulu dari unsur kemanusiaan. Apalagi mereka muslim dan di Aceh ini mayoritas muslim," tuturnya.

"Penting hari ini kita harus

peduli dulu, kemudian pemerintah harus melihat persoalan ini bagaimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini," sambungnya.

Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga merespons banyaknya penolakan atas kehadiran imigran Rohingya itu.

"Memang kalau persoalan menolak barang kali begini, ada hal-hal yang mungkin tidak bisa ditoleransi. Mungkin ada mereka, peraturan-peraturan yang ada di lokal kita sendiri. Mungkin mereka melanggar atau gimana, tetapi bukan hanya disisi itu menurut saya, tapi ada sisi kemanusiaan yang harus juga kita lihat," kata Rafly.

Disisi lain, Anggota Komisi VI DPR ini pun tidak menyalahkan adanya penolakan tersebut.

"Jadi satu sisi saya tidak menyalahkan juga, tetapi disisi lain ini adalah secara hakikat bentuk Allah menghendaki di dalam hati kita untuk mengukur kedalaman kasih sayang kita," tukasnya.

"Mestinya mereka harus ditampung dulu, bermusyawarah dulu, kita selamatkan dulu. Itu anak-anak kecil, kita ingat anak kita seperti apa. Ini dulu yang pertama kali harus kita ingat," ucap Rafly menambahkan.

Diketahui, para pengungsi Rohingya tiba di Pidie pada Minggu pagi, 19 November 2023.

Kehadiran imigran itu merupakan gelombang ketiga.



"Di sini kita melihat bayi dan anak-anak kecil. Mereka ini bukan sengaja untuk berlayar dan bersusah payah, tetapi ada persoalan lain bahwa mereka itu susah mendapatkan kehidupan yang layak dan kehidupan yang baik di negeri sendiri,"

## **RAFLY KANDE**

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Nangroe Aceh Darussalam I

Saat ini mereka ditampung di Meunasah atau Masjid di Kabupaten Pidie, Aceh.

Sebelumnya, Rabu, 15 November 2023, sebanyak 146 orang pengungsi etnis Rohingya yang terdiri dari 44 orang laki-laki, 61 orang perempuan, dan 41 orang anak-anak terdampar

di Desa Pasi Beurandeh.

Di hari yang sama, sebanyak 220 imigran Rohingya juga telah mendarat di kawasan pesisir Desa Kulee Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, Aceh. Masyarakat membantu mereka secara swadaya.

Baru dua tahun jadi Anggota DPR RI



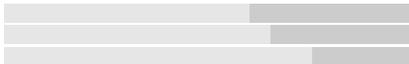
# Diah Nurwitasari

Menjadi Anggota DPR Teraspiratif  
versi Mahasiswa di Kabupaten  
Bandung dan Bandung Barat  
Berdasarkan Survey Kaukus  
Jurnalists untuk  
Demokrasi  
Jabar (KJD)

Sumber



32%



40% Cucun Ahmad Syamsurijal ( Fraksi PKB)  
32% Diah Nurwitasari( Fraksi PKS)  
25% Ace Hasan Syadzily ( Fraksi Golkar)



## Terima Kunjungan Mahasiswa Undip, Adang Daradjatun: Jaga Pemilu 2024 agar Jujur dan Adil!

Jakarta (23/11) -- Anggota Komisi III Fraksi PKS DPR RI sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Adang Daradjatun menerima kunjungan aspirasi dari mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) di Ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Kamis (23/11)

Pada kesempatan ini, mahasiswa Universitas Diponegoro khususnya dari BEM Fisip Undip mengunjungi Fraksi PKS DPR RI dalam rangka menyalurkan aspirasi dan memperkaya pengetahuan mengenai lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Adang mengatakan bahwa diadakannya agenda aspirasi PKS ini bertujuan untuk membuka ruang dan mendengarkan permasalahan di berbagai daerah.

"Ruang aspirasi PKS disini untuk mendengarkan permasalahan di berbagai daerah kalian (mahasiswa Undip). Jadi kalian bisa membuat resume permasalahan biar nanti kita berikan ke komisi yang ada di DPR khususnya fraksi PKS dan ditindak lanjuti," ucap Adang.

Adapun, Ketua MKD ini juga menyebutkan bahwa dirinya akan selalu menerima seluruh aspirasi dan pertanyaan

dari seluruh elemen masyarakat khususnya mahasiswa.

"Saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. saya akan menerima seluruh aspirasi atau pertanyaan dari kalian semua, karena itu tugas kita," ujar Adang.

Selain itu, Anggota Komisi III ini mengungkapkan bahwa PKS terus membela kepentingan rakyat di segala forum DPR RI baik dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya agar seluruh keputusan bisa

mensejahterakan rakyat.

Dirinya pun berpesan dan mengajak agar mahasiswa untuk terus menilai dan mengkritisi kebijakan atau pembahasan terkini di DPR RI.

"Anda sebagai mahasiswa yang intelektual dan hebat sangat boleh untuk menilai apapun permasalahan yang ada di Indonesia. saya tahu betul isi hati kalian terhadap melihat suatu fenomena," kata Adang

Kemudian, dirinya berharap agar mahasiswa yang akan berpartisipasi di Pemilu 2024 nanti bisa menjaga dengan baik penyelenggaraannya.

"Anda sebagai mahasiswa harus ikut serta dalam membuat Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Anda sebagai anak muda tolong kesalahan yang ada dikritisi agar negara kita selalu sehat. Kalian lah yang akan menjadi penerus bangsa jadi jaga idealisme yang baik," tutup Adang

"Anda sebagai mahasiswa harus ikut serta dalam membuat Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Anda sebagai anak muda tolong kesalahan yang ada dikritisi agar negara kita selalu sehat. Kalian lah yang akan menjadi penerus bangsa jadi jaga idealisme yang baik,

**Drs. H. ADANG DARADJATUN**  
Anggota Komisi III DPR RI



## Ledia Hanifa Ajak Pelajar untuk Jadi Pemimpin Bertanggung Jawab

Jakarta (22/11) -- Anggota Komisi X sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menerima kunjungan dari siswa dan siswi Mardani Leadership School di Ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Rabu (22/11).

Pada kesempatan ini, siswa-siswi Mardani Leadership School yang terdiri atas SMP dan SMA tersebut mengunjungi Fraksi PKS DPR RI dalam rangka menyalurkan aspirasi dan memperkaya pengetahuan mengenai lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Ledia menjelaskan kepada para siswa untuk menjadi pemimpin yang amanah dan berkesesuaian dengan wewenang, serta bertanggung jawab pada kewajibannya.

"Jiwa kepemimpinan dapat diasah sehingga siapapun dapat menjadi pemimpin asal terlatih dan terasah dengan baik dalam menjalankan kesehariannya secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab," jelas Ledia.

Ledia menekankan bahwa kunci menjadi pemimpin yang baik adalah mendalami cara berkomunikasi yang jelas maka diperlukan latihan untuk urgensi kompetensi tersebut.

"80 persen masalah muncul karena komunikasi,

bukan karena substansi. Maka dari itu diperlukan skill untuk mengatasi hal tersebut" ungkap Ledia.

Ia juga menambahkan kepada siswa-siswi bahwa menjadi Anggota DPR juga harus memiliki skill komunikasi yang baik agar dapat semakin membantu masyarakat, contohnya dapat memeratakan kesejahteraan bagi anak yang tidak bisa sekolah dan guru yang belum mendapatkan kesejahteraannya.

"Perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama, jangan memikirkan terlebih dahulu tentang kesulitan dan hal-hal lain yang dapat menurunkan semangat juang di diri kita, yang penting adalah bagaimana selalu mencari peluang dalam segala kesempatan yang ada"

Dalam sesi tanya-jawab, Ledia juga sempat menjelaskan mengenai ratanya kesempatan perempuan dan laki-laki agar dapat bersama membangun negeri ini.

"Perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama, jangan memikirkan terlebih dahulu tentang kesulitan dan hal-hal lain yang dapat menurunkan semangat juang di diri kita, yang penting adalah bagaimana selalu mencari peluang dalam segala kesempatan yang ada" tegas Ledia.

Kunjungan ini diakhiri dengan sesi dokumentasi dan pemberian cinderamata oleh kedua belah pihak. Peserta kunjungan sebelumnya juga telah melakukan tur keliling kawasan kompleks Gedung DPR RI.

**Hj. LEDIA HANIFA  
A, S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Komisi X DPR RI



## Serap Aspirasi, Amin Ak Berkomitmen Bantu Pemulangan Barang Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Jakarta (27/11) -- Anggota Komisi VI Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak, menerima aspirasi Pekerja Migran dan Jasa Pengiriman Barang yang khususnya menaungi wilayah Semarang dan Surabaya, melalui platform virtual zoom pada Senin (27/11).

Dalam pertemuan ini, Perwakilan Pekerja Migran dan Jasa Pengiriman Barang menyampaikan bahwa akibat mandat dari PMK No. 199/PMK.10/2019 yang diganti dengan PMK No. 96/PMK.10/2023, banyak masalah muncul di lapangan, salah satunya banyak barang PMI yang tertahan di luar negeri dan tidak bisa dikirim ke Indonesia.

Menanggapi keluhan tersebut, Amin menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan permasalahan tersebut dalam Rapat Komisi VI bersama dengan Kementerian Perdagangan agar dapat ditindaklanjuti secara cepat.

"Terkait dengan banyaknya barang PMI yang tertahan di luar negeri tersebut akan disampaikan dalam rapat bersama mitra kerja Komisi VI DPR RI agar ditindaklanjuti secara cepat, namun harus siap dengan respons pemerintah karena banyak komponen pendukung yang masih harus diperhatikan," ungkap Amin.

Dalam pertemuan yang menghadirkan Perwakilan Pekerja Migran Indonesia itu,

Amin pun menyebut bahwa peraturan yang berisikan mandat impor yang harus dipenuhi dengan barang baru harus memiliki spesifikasi yang komprehensif agar tidak merugikan PMI.

"Kami akan mengkoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan agar barang-barang dapat cepat sampai ke tangan PMI mengingat sebagian makanan merupakan pakaian bekas yang masih terpakai dan

makanan yang bisa kadaluarsa atau bahkan busuk, serta masalah peraturan yang tertera harus memiliki penjelasan lebih lanjut," tegas Amin.

Terakhir, Amin menyatakan komitmennya untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan aturan PMI sehingga kebijakan yang diambil dapat menjamin kelancaran layanan PMI.

"Pemerintah telah melakukan langkah-langkah tegas dalam rangka melindungi UMKM dalam negeri dengan cara secara umum menutup impor barang bekas, kebijakan tersebut perlu didukung asal di dalamnya benar-benar tidak ada permainan," tutup Amin.

"Kami akan mengkoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan agar barang-barang dapat cepat sampai ke tangan PMI mengingat sebagian makanan merupakan pakaian bekas yang masih terpakai dan makanan yang bisa kadaluarsa atau bahkan busuk, serta masalah peraturan yang tertera harus memiliki penjelasan lebih lanjut,"



## Terima Kunjungan Satpol PP DKI Jakarta, Mardani akan Bantu Perjuangkan Kenaikan Statusnya

Jakarta (28/11) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menerima kunjungan dari Pegawai PTT Satpol PP DKI Jakarta di Ruang Inbang Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (28/11).

Dalam pertemuan ini Suryawan salah satu Anggota pegawai PTT Satpol PP DKI Jakarta penjabarkan keluh kesalnya terkait status kepegawaian satpol PP dimana masih banyak Satpol PP non ASN.

"Dalam pertemuan ini kami mengeluhkan masih banyaknya satpol PP yang non ASN dan honorer. Sebanyak

70% Satpol PP non pns sedangkan yang pns 30% jumlahnya sangat timpang. Gaji pun di bawah UMP. Padahal dalam peraturannya seharusnya satpol PP masuk ASN," ucap Suryawan.

Mardani Ali memberikan tanggapan positif mengenai hal ini. Ia juga mengafirmasi bahwa dalam peraturannya memang Satpol PP yang honorer sudah seharusnya diangkat menjadi ASN.

"Oke baik, tuntutan di terima dan akan di proses. UU ASN adalah inisiatif DPR, tetapi isinya pesenan pemerintah semua. Seluruh honorer angkat diangkat menjadi ASN, yg tidak berkinerja atau berprestasi di

atas bisa di copot dan di ganti oleh yang bawah, sehingga ada pergantian," tegasnya.

Mardani Ali juga menginformasikan kemungkinan terburuk untuk menjadi P3K penuh dahulu.

"Saya tetap usahakan untuk menjadi ASN, tetapi Saya berpendapat plan terakhirnya masuk dulu P3K tapi full tidak paruh waktu, karena yg sekarang di proses slotnya P3K," ujar Mardani.

Diakhir pertemuan ditutup dengan penegasan harus di dijaga komunikasi serta mengingatkan bahwa perjuangan ini tidak bisa berburu-buru harus melalui proses-proses.

"Oke baik, tuntutan di terima dan akan di proses. UU ASN adalah inisiatif DPR, tetapi isinya pesenan pemerintah semua. Seluruh honorer angkat diangkat menjadi ASN, yg tidak berkinerja atau berprestasi di atas bisa di copot dan di ganti oleh yang bawah, sehingga ada pergantian,

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI



## Terima Kunjungan Mahasiswa FH UII, Fraksi PKS Siap Fasilitasi Diskusi Dua Arah Terkait Isu Lingkungan

Jakarta (28/11) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, Saadiyah Uluputty, dan Diah Nurwitasari, menerima kunjungan dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH Universitas Islam Indonesia (UII) di Ruang Rapat Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Selasa (28/11).

Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran serta diskusi aspirasi terkait urgensi pengakuan lingkungan sebagai agenda legislasi melalui hasil kajian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

"Terima kasih atas ketersediaannya untuk menerima kami. Tujuan kami adalah untuk mendapatkan output dari fokus isu yang kami telah utamainya terkait energi dan lingkungan." ucap perwakilan dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII.

"Kajian ini menjadi embrio bagi penyusunan kebijakan lingkungan bagi masa depan. Saya mengapresiasi karena saya rasa kita berada di generasi penikmat, sehingga kehadiran mahasiswa yang kritis seperti kalian maka kami sangat senang. Mahasiswa harus terus berpikir untuk masa depan kita agar anak cucu kita mampu menikmati alam dan lingkungan secara baik." ucap Saadiyah yang juga Anggota Komisi IV DPR RI dalam menanggapi pemaparan dari mahasiswa.

"Saya sangat bersyukur dan berbahagia bisa bertemu adik-adik mahasiswa. Merupakan sebuah kegembiraan juga bagi kami untuk bisa berdiskusi terkait topik-topik yang menarik. Mudah-mudahan di forum diskusi ini kita bisa paling berbagi karena kami pun perlu masukan-masukan dari mahasiswa." ujar Diah selaku Anggota Komisi VII DPR RI.

Diah menambahkan, membicarakan lingkungan hidup tidak hanya membicarakan hal-hal yang

bersifat natural. Perlu ada koordinasi lanjutan secara Pentahelix yang meliputi akademisi, media, dan tiga unsur pemerintahan di Indonesia yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Implementasi rekomendasi green city pun menjadi tantangan apabila industri belum menerapkan transisi penggunaan green energy.

Sukamta yang juga merupakan Anggota Komisi I DPR RI menambahkan, persoalan lingkungan yang ada di Indonesia maupun negara-negara lain harus diselesaikan secara holistik. Energi terbarukan harus diseriuseri untuk menyelesaikan persoalan, bukan sekadar kepentingan politik semata.

Sesi diskusi berlangsung dua arah dan diakhiri dengan sesi dokumentasi serta pemberian cinderamata.

"Saya sangat bersyukur dan berbahagia bisa bertemu adik-adik mahasiswa. Merupakan sebuah kegembiraan juga bagi kami untuk bisa berdiskusi terkait topik-topik yang menarik. Mudah-mudahan di forum diskusi ini kita bisa paling berbagi karena kami pun perlu masukan-masukan dari mahasiswa."

Dipl.Ing. Hj. **DAH**  
**NURWITASARI**, M. I. POL.  
Anggota Komisi VII DPR RI

Terima Aspirasi Kaukus  
Muda Betawi,

## Mardani Dorong Pengembangan Eksistensi Adat dan Kebudayaan!

Jakarta (28/11) — Anggota Komisi II Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera menerima kunjungan aspirasi dari Kaukus Muda Betawi di Ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Senin (28/11).

Pada kesempatan ini, Kelompok Gerakan (Kaukus) Muda Betawi mengunjungi Fraksi PKS DPR RI dalam rangka menyalurkan aspirasinya terkait Perubahan RUU No. 29 tahun 2007 Tentang Daerah Khusus Jakarta Riwatan selaku perwakilan Kaukus Muda Betawi menyampaikan aspirasinya terkait perubahan RUU No. 29 tahun 2007 Tentang Daerah Khusus Jakarta yang secara spesifik tidak memuat tentang keberadaan budaya dan masyarakat Betawi sebagai payung hukum untuk mengakomodir peran masyarakat adat.

"Sudah sembilan kali

perubahan undang-undang tetapi tidak memuat tentang kebudayaan dan masyarakat betawi, jadi kita ini hidup di tengah kota akan tetapi seperti anak tiri jadinya."

Perwakilan lainnya, Husni juga mengafirmasi dengan menjelaskan pada Pasal 22 Ayat 1 Bagian B yang perlu di dorong untuk penambahan klausul yang menyangkut tentang eksistensi lembaga adat dan kebudayaan Betawi, mereka juga mempertanyakan posisi asimetris Jakarta dana undang-undang tersebut.

"Dari jumlah bab/pasal yang ada Kaukus 'concern' di

pasal 22 huruf B, baru tercantum badan usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat, adapun yang ingin kita dorong adalah lembaga adat dan kebudayaan Betawi, untuk menjaga eksistensi dan mengembangkan kebudayaan dan bahasa Betawi itu sendiri, dan kalau posisi undang-undang Jakarta ini asimetris dimana asimetrisnya apakah sama seperti aceh, jogja, dan lainnya," ungkapnya.

Mardani selaku Anggota Komisi II Fraksi PKS DPR RI, menanggapi dengan menjelaskan bahwa di RUU ini masih dalam proses pembahasan dan Fraksi PKS di komisi II sendiri belum menerima komposisi usulan-usulan klausul secara keseluruhan, ia juga menyebutkan bahwa sedang berusaha memasukkan klausul tentang budaya dan adat Betawi yang tidak berpotensi merusak tatanan kesatuan masyarakat Indonesia.

"Revisi terakhir RUU tentang Jakarta ada beberapa isu, salah satunya tentang otonomi satu tingkat dan bahkan ada usulan gubernurnya diangkat oleh presiden, tetapi kami belum menerima usulan itu, kami juga sedang berusaha untuk mencantumkan perihal budaya dan adat betawi tetapi dengan tidak merusak tatanan bhineka tunggal ika, dan itu belum kelar," ujar Mardani.

Anggota Komisi II itu juga mengatakan bahwa dirinya



"Revisi terakhir RUU tentang Jakarta ada beberapa isu, salah satunya tentang otonomi satu tingkat dan bahkan ada usulan gubernurnya diangkat oleh presiden, tetapi kami belum menerima usulan itu, kami juga sedang berusaha untuk mencantumkan perihal budaya dan adat betawi tetapi dengan tidak merusak tatanan bhineka tunggal ika, dan itu belum kelar,"

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

sepatak dengan konsep pengembangan eksistensi adat dan kebudayaan Betawi sebagai upaya membangun kekuatan masyarakat dalam kancah perpolitikan.

"Saya setuju ketika kita berdemokrasi kita harus melihti, saya sepatak untuk memperbaiki

budayanya dulu, baru kemudian masuk dalam pertarungan politik," pungkasnya.

Diakhir Mardani menyampaikan bahwa ia akan berusaha memperjuangkan usulan penambahan klausul tersebut dengan menggunakan strategi pendekatan persuasif yang soft kepada fraksi-fraksi lain.



## Terima Kunjungan Salim Salimah Depok, Ledia Hanifa Ajak Ibu-Ibu Aktif dalam Pemilu 2024

Jakarta (29/11) — Anggota Komisi X sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah,

menerima kunjungan dari Salim Salimah Depok beserta para Calon Anggota Dewan (CAD) Kota dan Provinsi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta

“Kami sangat berbahagia bisa menyambut ibu-ibu semua. Ini menjadi bentuk nyata mewujudkan parlemen yang terbuka bagi masyarakat. “Lebih baik ibu-ibu pusing memilih lima surat suara dalam waktu lima menit daripada menyesal selama lima tahun ya bu.””

**Hj. LEDIA HANIFA  
A, S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Komisi X DPR RI

pada Rabu (29/11).

Kunjungan ini ditujukan sebagai bentuk silaturahmi dan pengenalan lingkungan DPR sebagai badan legislatif kepada para peserta kunjungan yang terdiri dari kelompok ibu-ibu.

“DPR ini adalah rumah rakyat dan rumah ibu-ibu semua. Kita akan berkeliling nanti dan semoga ibu-ibu mendapatkan banyak pengalaman berharga.” ujar Kholid selaku koordinator rombongan Salim Salimah Depok.

Dalam menerima kunjungan ini, Ledia mengaku senang dengan semangat ibu-ibu yang hadir untuk bisa mempelajari DPR secara langsung.

“Kami sangat berbahagia bisa menyambut ibu-ibu semua. Ini menjadi bentuk nyata

mewujudkan parlemen yang terbuka bagi masyarakat.” ujar Ledia dalam sambutannya.

Ledia memberikan berbagai pemahaman terkait Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ada di lingkungan kerja DPR RI. Ledia juga mengajak masyarakat untuk bersemangat dan tidak apatis dalam menyambut Pemilu 2024 nanti.

“Lebih baik ibu-ibu pusing memilih lima surat suara dalam waktu lima menit daripada menyesal selama lima tahun ya bu.” ucap Anggota Komisi X DPR RI tersebut.

Rombongan kemudian berfoto bersama dan melanjutkan kegiatan tur mengelilingi Kompleks Gedung DPR RI, meliputi Museum, Ruang Rapat Paripurna, dan Ruang Fraksi PKS DPR RI.

# HARI ASPIRASI Fraksi PKS DPR RI

Periode Januari 2023  
sd November 2023

BULAN	ASPIRASI	
Januari		12
Februari		8
Maret		4
April		1
Mei		7
Juni		14
Juli		4
Agustus		5
September		12
Oktober		
November		15



## SIFAT ASPIRASI

**45** Advokasi

**12** Legislasi

**8** Pembelajaran

**17** Pendidikan  
Politik

**TOTAL  
PENERIMAAN  
ASPIRASI**

**82**



## Legislator PKS Tegaskan Guru Harus Tingkatkan Kualitas Diri, Jadi Sosok Teladan Generasi Bangsa

Jakarta (27/11) --- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan bahwa Hari Guru Nasional (HGN) harus menjadi momen pengingat semua pihak agar meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru di Indonesia.

Ledia mengingatkan peringatan ini jangan terbatas hanya jadi sekadar seremonial saja.

"Guru juga harus bisa menggali semua persoalan-persoalan yang ada pada siswa-siswanya dan siap untuk mengembangkan potensi para siswa," tutur Ledia di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Bagi Politisi Fraksi PKS itu, guru bukan merupakan pekerjaan yang mudah.

Ledia mendorong setiap stakeholder untuk mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi guru agar bisa menjadi sosok teladan bagi siswa dengan penuh kasih sayang.

"Pertama, guru adalah teladan. Kedua, guru harus bisa menjadi kawan komunikasi anak-anak kita. Ketiga tentu guru adalah orang-orang yang bisa memahami bagaimana potensi anak-anak kita," ungkapnya.

Selanjutnya, Ledia menilai stakeholder juga harus bisa mendampingi guru agar bisa melejitkan potensi-potensi yang dimiliki. Di sisi lain, ia berharap guru juga dapat berkomunikasi dengan sekolah dan orang tua

dan lingkungan, bagaimana tentang pengembangan pribadi para siswa ini.

Menurutnya, lahirnya peristiwa 'sadis' dan di luar nalar yang terjadi pada siswa seperti anak SD melompat dari lantai empat, hingga ada penusukan pada teman sebayanya itu disebabkan hilangnya prinsip dalam dunia pendidikan.

"Ayo kita memfokuskan kepada pengembangan karakter siswa kita dengan menjadi teladan yang baik. Kemudian ketika ada kurikulum merdeka ini enggak boleh hilang itu prinsip

dasar yang tadi," ajaknya.

Dirinya juga menilai, hal ini bukan hanya menjadi tugas seorang guru, tapi juga peran orang tua dan orang dewasa yang ada di lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong peningkatan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan para guru agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa terbebani persoalan-persoalan yang lain.

"Mari kita sama sama memberikan kebahagiaan pada guru ketika anak-anak mendapat kesempatan merdeka belajar maka guru pun harus mendapatkan kemerdekaannya dalam mengajar agar mereka bisa terus berkembang dan memberikan dorongan terbaik bagi putra/putri kita," pungkas legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat I.

"Mari kita sama sama memberikan kebahagiaan pada guru ketika anak-anak mendapat kesempatan merdeka belajar maka guru pun harus mendapatkan kemerdekaannya dalam mengajar agar mereka bisa terus berkembang dan memberikan dorongan terbaik bagi putra/putri kita,"

**Hj. LEDIA HANIFA  
A, S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Komisi X DPR RI



Gambar : Istimewa

## Peringati Hari Solidaritas Palestina Internasional, **HNW Ingatkan Utang PBB untuk Kemerdekaan Palestina**

Jakarta (30/11) — Anggota Komisi VIII DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengingatkan utang Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) untuk kemerdekaan bangsa Palestina pada Hari Solidaritas Palestina Internasional yang jatuh pada setiap tanggal 29 November.

Solidaritas Palestina Internasional yang ditetapkan oleh PBB ini sudah selama 45 tahun diperingati setiap tahunnya. Seharusnya bisa dijadikan penyemangat PBB untuk melaksanakan Resolusi2nya yang terkait agar dapat memerdekakan bangsa dan negara Palestina dengan memenuhi keadilan serta hak-hak rakyat Palestina berdasarkan hukum internasional."

HNW sapaan akrabnya mengatakan peringatan Hari Solidaritas Palestina Internasional tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini, sebelum diperingati, terjadi kembali agresi militer brutal pemerintah Israel ke wilayah Palestina di Jalur Gaza yang telah menewaskan ribuan orang.

ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (30/11).

HNW sapaan akrabnya mengatakan peringatan Hari Solidaritas Palestina Internasional tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini, sebelum diperingati, terjadi kembali agresi militer brutal pemerintah Israel ke wilayah Palestina di Jalur Gaza yang telah menewaskan ribuan orang.

"Bukan hanya itu, Israel kembali mempertontonkan aksinya yang brutal dan tidak akan dilakukan oleh bangsa beradab mana pun, dengan menyerang rumah sakit dan tempat pengungsian, dan menewaskan belasan ribu warga yang mayoritas mutlaknyanya adalah warga sipil, perempuan dan anak-anak,"ujarnya.

Lebih lanjut, HNW menyerahkan kepada pemerintah Indonesia untuk makin serius dan fokus mengajak seluruh anggota PBB untuk menghentikan

aksi pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang dilakukan Israel itu secara permanen, bukan hanya secara sementara.

Apalagi, lanjutnya, Indonesia saat kemerdekaan dahulu dibantu oleh bangsa Palestina sehingga Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki utang untuk melakukan hal yang sama kepada mereka, membantu agar Palestina merdeka.

HNW juga mengapresiasi Menteri Luar Negeri yang dalam beberapa pekan terakhir telah menjalin komunikasi dengan banyak negara membela Palestina terkait pembantaian Israel di Jalur Gaza, serta menyampaikan secara lugas dan tegas sikap resmi Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, kemarin, yang pada intinya berisi pembelaan keadilan dan

## Peringati Hari Solidaritas Palestina Internasional, HNW Ingatkan Utang PBB untuk Kemerdekaan Palestina

### « SEBELUMNYA

kemanusiaan kepada rakyat Palestina, penolakan keras terhadap pelanggaran hukum internasional oleh Israel, dan agar PBB serius mengambil tanggungjawab memenuhi kewajiban-kewajiban dan resolusi-resolusinya terkait Palestina dan kemerdekaan Palestina.

Apalagi, pada Kamis (30/1), Dewan Keamanan PBB akan melakukan pertemuan untuk kembali membahas perkembangan di Gaza. Pertemuan yang akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RTT) itu menjadi momen yang sangat penting untuk mewujudkan spirit 'Hari Solidaritas Palestina' yang diputuskan sendiri oleh PBB, agar segera dapat diwujudkan kemerdekaannya Palestina dan diakhirinya penjajahan atas Palestina dan pendudukan kembali wilayah Gaza oleh Israel, mengingat resolusi Dewan Keamanan PBB memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

"Penting sekali dimaksimalkan perjuangan yang saat ini sedang dilakukan oleh Menlu

agar dapat berhasil dan mendapat dukungan dari banyak negara. Namun, penting untuk diingat, selain bekerja sama dengan negara-negara yang jelas mendukung Palestina, dan menolak keras kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang Israel terhadap Gaza, penting juga dilakukan lobby atau diplomasi terhadap negara-negara yang memiliki hak veto di DK PBB. Agar di saat yang sangat krusial ini, dan momentum memperingati Hari Solidaritas Palestina, tidak dilakukan veto yang bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan atau veto yang 'membolehkan' genosida terus terjadi, dan perdamaian tidak terwujud di kawasan itu, karena kemerdekaan Palestina tidak kunjung diwujudkan, padahal sudah sejak 45 tahun yang lalu Majelis Umum PBB memutuskan adanya hari Internasional Solidaritas Palestina," pungkasnya.



"Penting sekali dimaksimalkan perjuangan yang saat ini sedang dilakukan oleh Menlu agar dapat berhasil dan mendapat dukungan dari banyak negara. Namun, penting untuk diingat, selain bekerja sama dengan negara-negara yang jelas mendukung Palestina, dan menolak keras kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang Israel terhadap Gaza, penting juga dilakukan lobby atau diplomasi terhadap negara-negara yang memiliki hak veto di DK PBB.

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI



**Follow  
Akun tiktok  
Fraksi PKS DPR RI**

**@fraksipksdprri**



Gambar : Istmewa

## Dr. Salim Segaf Aljufri : We Stand With Palestine, Stop Genosida Israel di Gaza!

Jakarta (21/11) -- Ketua Persatuan Ulama Internasional Dr. Salim Segaf Al-Jufri mengecam agresi Zionis Israel ke Palestina sebagai upaya genosida di luar batas kemanusiaan sehingga Israel mendapat sanksi yang tegas dan pemimpinya layak diseret Mahkamah Pidana Internasional sebagai penjahat perang.

International Webinar  
on Palestine



Hal ini disampaikan saat membuka acara Seminar Internasional "Stop Israeli Genocide in Gaza!" yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI berkolaborasi dengan Justice and Democracy Forum Istanbul (JDF) dan The Strategia Institute pada Selasa (21/11).

Acara diantarkan oleh Ketua Fraksi PKS DPR Dr. Jazuli Juwaini dengan narasumber Ketua Kaukus Parlemen Malaysia Untuk Palestina Syed Ibrahim Syed Noh, Ketua Forum Demokrasi dan Keadilan Istanbul Dr. Azzam Ayoubi, dan Ketua Kaukus Palestina DPR RI Dr. Sahrul Aidi Maazat.

Mengawali pidatonya, Dr. Salim menyampaikan kepe-

dihan warga dunia melihat besarnya korban sipil di Gaza Palestina dimana lebih dari 12.000 korban jiwa meninggal dan 75 persen anak-anak, perempuan, hingga orang tua terhitung sejak 7 Oktober 2023.

Dr. Salim juga menjelaskan 32.000 warga sipil terluka dan membutuhkan perawatan, akan tetapi rumah sakit-rumah sakit yang ada telah habis diluluhlantakkan oleh Zionis Israel sehingga berhenti beroperasi.

"1,6 juta penduduk Gaza harus mengungsi karena rumah mereka hancur dihantam bom-bom Israel" ujar Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Tentara pendudukan Israel, lanjut Salim, telah

menjatuhkan lebih dari 32.000 ton bahan peledak di Gaza antara 7 Oktober hingga 10 November. Total kekuatan ini, jelas Dr. Salim, setara dengan dua kali kekuatan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang dalam Perang Dunia II.

Dalam pidatonya, Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang juga merupakan Ketua Persatuan Ulama Internasional mengajak peserta seminar untuk mengheningkan cipta dan memanjatkan doa agar tragedi kemanusiaan di Palestina dapat segera dihentikan dan rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya.

Menteri Sosial RI 2009-2014 ini juga mengajak semua pihak untuk dengan jelas dan tegas melihat permasalahan di Palestina. Pertama, bangsa Palestina adalah pejuang kemerdekaan yang membela diri dan terus mewujudkan kemerdekaannya. Kedua, sebaliknya Israel adalah bangsa penjajah yang menduduki tanah Palestina secara tidak sah sejak tahun 1948.

"Satu-satunya bangsa yang belum merdeka di era modern

BERIKUTNYA >>>

Dr. Salim juga menjelaskan 32.000 warga sipil terluka dan membutuhkan perawatan, akan tetapi rumah sakit-rumah sakit yang ada telah habis diluluhlantakkan oleh Zionis Israel sehingga berhenti beroperasi.

## Dr. Salim Segaf Aljufri : We Stand With Palestine, Stop Genosida Israel di Gaza!

### « SEBELUMNYA

ini hanya Palestina. Kita semua, khususnya bangsa Indonesia, punya utang sejarah kemerdekaan Palestina. Bung Karno pernah berjanji bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel.” jelas Dr. Salim.

Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 tidak serta merta menjadi alasan atas apa yang terjadi di Gaza hari ini. Dr. Salim menjelaskan bahwa ini adalah perihail, okupasi, aneksasi, agresi, penjajahan, dan penindasan yang dilakukan Israel sejak 75 tahun silam saat bangsa Israel mendirikan negara di wilayah Palestina.

“Oleh karena itu, sampai kapanpun kita akan terus mengatakan We Stand With Palestine! Kita bersama Palestina sampai bangsa Palestina mencapai kemerdekaannya,” seru Dr. Salim.

Dr. Salim menjelaskan bahwa konflik ini bukanlah konflik dua negara yang memperebutkan wilayah, melainkan sudah menjadi sebuah upaya pemusnahan etnis dan genosi-

da rakyat Palestina oleh Israel. “Maka, kita lihat permasalahan ini bukan masalah domestik rakyat Palestina semata, bukan pula masalah kawasan Timur Tengah. Akan tetapi, kita melihat apa yang terjadi di Palestina merupakan masalah kemanusiaan dunia, bahkan melampaui masalah keyakinan, agama, dan kepentingan apapun.” ucap Dr. Salim.

Masih dalam penjelasannya, Dr. Salim menyatakan bahwa Indonesia ingin rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya sebagaimana hak paling dasar yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

“Inilah jantung dan episentrum kemanusiaan dunia yang membutuhkan intervensi dari negara-negara yang beradab. Maka kita semua harus bersuara: Stop genosida, Stop agresi, Stop pendudukan, Stop penjajahan!” seru Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

“Sudah saatnya kita hentikan arogansi Israel dan menyeret para pemimpinnya ke Mahkamah Pidana Internasional sebagai penjahat perang.” pungkas Dr. Salim diakhir pidatonya.



“Satu-satunya bangsa yang belum merdeka di era modern ini hanya Palestina. Kita semua, khususnya bangsa Indonesia, punya utang sejarah kemerdekaan Palestina. Bung Karno pernah berjanji bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel.”

**Dr. SALIM SEGAF ALJUFRI, MA**

Ketua Majelis Syuro PKS

# Ketua Fraksi PKS: Palestina Merdeka Satu-Satunya Solusi Perdamaian!

Jakarta (21/10) – Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menegaskan bahwa satu-satunya solusi dan jalan keluar dari penjajahan Israel atas Palestina ialah mewujudkan Palestina yang merdeka dan berdaulat di atas tanahnya sendiri.

Hal ini disampaikan Jazuli saat memberikan sambutan dalam Webinar Internasional tentang Palestina bertajuk "Stop Genosida Israel di Gaza" yang digelar oleh Fraksi PKS DPR RI bekerjasama dengan Justice and Democracy Forum (JDF) Istanbul dan The Strategia Institute melalui platform daring Zoom di Jakarta, pada Selasa (21/11/2023).

Acara dibuka oleh Ketua Majelis Syura PKS yang juga merupakan Ketua Persatuan Ulama Dunia Habib Dr. Salim Segaf Aljifri, dengan narasumber Ketua Kaukus Parlemen Malaysia Untuk Palestina Syed Ibrahim Syed Noh, Ketua Forum Demokrasi dan Keadilan Istanbul Dr. Azzam



Ayoubi, dan Ketua Kaukus Palestina DPR RI Dr. Sahrul Aidi Maazat. Acara dihadiri lebih 2000 peserta melalui platform zoom, youtube dan akun sosial media Fraksi PKS lainnya.

Menurut Jazuli Juwaini, permasalahan Palestina menuntut tanggung jawab kemanusiaan dunia. "Apa yang bisa lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita kontribusikan, kita kontribusikan. Seraya kita berharap

kepada Pemerintah Indonesia dan negara-negara yang bertetangga dengan Palestina, khususnya yang berpenduduk mayoritas Islam, menuntun Israel untuk segera menghentikan agresi mereka di Palestina. Dan yang pasti, menuntun solusi perdamaian yang paling utama, yakni memastikan kemerdekaan bangsa dan negara Palestina", ujar Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Melalui webinar ini, imbuh Jazuli, Fraksi PKS berkomitmen untuk terus berbuat dalam rangka membantu dan mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina.

"Fraksi PKS mengadakan webinar internasional ini sebagai bentuk tanggung jawab Fraksi PKS yang merupakan salah satu komponen bangsa Indonesia, yang menyadari sepenuhnya tentang amanat konstitusi. Salah satunya berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia", ungkap Jazuli.

Lebih lanjut, Jazuli menyebut bahwa webinar ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan dari Fraksi PKS terhadap apa yang terjadi di Gaza.

"Demi melindungi kemanusiaannya manusia, demi melindungi anak-anak, demi melindungi kaum perempuan, demi melindungi kaum lansia, dan demi melindungi rakyat sipil yang ada di Gaza dan Palestina, maka



"Fraksi PKS mengadakan webinar internasional ini sebagai bentuk tanggung jawab Fraksi PKS yang merupakan salah satu komponen bangsa Indonesia, yang menyadari sepenuhnya tentang amanat konstitusi. Salah satunya berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia", ungkap Jazuli.

kita harus terus suarakan dengan lantang dukungan kita terhadap perjuangan rakyat Palestina. Terlebih, dalam kondisi saat ini, ketika setiap hari tentara zionis Israel secara

membabi-butakan membantai anak-anak yang tak berdosa, membantai ibu-ibu yang tak berdosa, membantai rakyat sipil

## Ketua Fraksi PKS : Palestina Merdeka Satu-Satunya Solusi Perdamaian!

« SEBELUMNYA

yang tak berdosa, seperti seakan tak ada manusia lain di bumi ini, kecuali tentara zionis Israel dengan kesewenang-wenangannya", ungkap Anggota DPR dari Dapil Serang dan Cilegon ini.

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi PKS, ujar Jazuli, berterima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Presiden RI dan Menteri Luar Negeri RI, serta berterima kasih kepada negara-negara lain yang masih punya nurani, yang masih berdiri bersama rakyat Gaza dan Palestina dengan mendesak agar agresi zionis Israel segera dihentikan.

"Fraksi PKS mendukung upaya-upaya untuk membawa pimpinan politik Israel ke Mahkamah Internasional dan ditetapkan sebagai penjahat perang karena sudah memenuhi persyaratan, selain juga kita terus bersuara di berbagai forum guna memastikan kemerdekaan bangsa Palestina", tegasnya lagi.

Terakhir, ia pun berharap webinar ini akan memiliki pengaruh yang besar bagi rakyat Palestina. "Melalui

webinar internasional ini, mudah-mudahan bermanfaat dan makin menguatkan narasi yang telah dibangun oleh berbagai kelompok masyarakat bahwa kemerdekaan Palestina harus segera diberikan. Kita bisa lihat bersama, masyarakat di seluruh belahan dunia secara terang-terangan telah mendukung perjuangan rakyat Gaza dan Palestina dengan turun ke jalan, berdemonstrasi, bahkan walaupun, sikap pemerintah mereka secara resmi membela Israel", ucapnya.

"Kita pun terus mendorong agar negara-negara yang masih memiliki hati nurani dapat bersatu untuk memastikan kemerdekaan Palestina. Karena solusi yang paling tepat dari semua hal yang terjadi saat ini ialah Palestina merdeka", pungkask Jazuli.



Demi melindungi kemanusiaannya manusia, demi melindungi anak-anak, demi melindungi kaum perempuan, demi melindungi kaum lansia, dan demi melindungi rakyat sipil yang ada di Gaza dan Palestina, maka kita harus terus suarkan dengan lantang dukungan kita terhadap perjuangan rakyat Palestina. Terlebih, dalam kondisi saat ini, ketika setiap hari tentara zionis Israel secara membabi-butu membantai anak-anak yang tak berdosa, membantai ibu-ibu yang tak berdosa, membantai rakyat sipil yang tak berdosa, seperti seakan tak ada manusia lain di bumi ini, kecuali tentara zionis Israel dengan kesewenang-wenangannya"

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Salurkan*  
**ASPIRASI ANDA**  
**DI HARI ASPIRASI**  
**FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan  
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

## EVENT

fraksi.pks.id | Selasa 5 Desember 2023

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



FPKS Gelar Final LBKK Ke-VII,

## Dr. Salim : Upaya PKS Ciptakan Generasi Cerdas, Berintegritas, Beriman dan Bertakwa

Jakarta (05/12) --- Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Habib Salim Segaf Aljufri atau kerap dikenal Dr. Salim, menyatakan komitmen Fraksi PKS

untuk selalu mengupayakan terciptanya generasi-generasi cendekiawan muslim yang cerdas, berintegritas, beriman dan bertakwa untuk menyongsong Indonesia ke

“Salah satu tujuan dilaksanakannya lomba baca kitab kuning ini adalah agar para santri semakin termotivasi dan merasa dekat dengan ulama-ulama kita terdahulu, sebab dengan membaca kitab kuning kita akan tahu bagaimana pejuang-pejuang dan ulama-ulama kita dahulu, sehingga akan menciptakan generasi-generasi cendekiawan muslim yang cerdas, berintegritas, beriman dan bertakwa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita”, ungkapnya.

مسابقة قراءة الكتاب فتح العين

## Final Lomba Baca Kitab Kuning

EDISI VII 2023

FRAKSI PKS DPR RI

speech dalam acara Final Lomba Baca Kitab Kuning Edisi VII Tahun 2023 Fraksi PKS DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (05/12).

“Salah satu tujuan dilaksanakannya lomba baca kitab kuning ini adalah agar para santri semakin termotivasi dan merasa dekat dengan ulama-ulama kita terdahulu,

depan, melalui kegiatan Lomba Baca Kitab Kuning yang konsisten dilaksanakan setiap tahun.

Hal itu disampaikan Dr. Salim saat memberikan keynote

BERIKUTNYA >>>

## FPKS Gelar Final LBKK Ke-VII, Dr. Salim : Upaya PKS Ciptakan Generasi Cerdas, Berintegritas, Beriman dan Bertakwa

### « SEBELUMNYA

sebab dengan membaca kitab kuning kita akan tahu bagaimana pejuang-pejuang dan ulama-ulama kita dahulu, sehingga akan menciptakan generasi-generasi cendekiawan muslim yang cerdas, berintegritas, beriman dan bertakwa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita”, ungkapnya.

Dalam paparan selanjutnya Dr. Salim menyampaikan tujuan lain dari diadakannya Lomba Baca Kitab Kuning ini adalah bahwa Fraksi PKS komitmen menjadikan pesantren sebagai tiang utama penguah pendidikan nasional.

“Tujuan selanjutnya adalah untuk memajukan pesantren sebagai soko guru pendidikan nasional, kembali bagaimana pesantren yang jumlahnya cukup besar di Indonesia terus kita pertahankan, karena dari pesantren itu juga memunculkan pribadi-pribadi muslim, pribadi-pribadi pribumi Indonesia yang memahami bagaimana mencetak kader ke depan Wakil Rakyat yang berjuang untuk menyampaikan

dan mewujudkan aspirasi rakyat, memahami apa yang dirasakan masyarakat dibawah”, tegasnya.

Dr. Salim juga menyebut bahwa Fraksi PKS berupaya menumbuhkan semangat nasionalisme-religius bagi generasi-generasi saat ini sebagaimana yang dimiliki oleh generasi pendiri bangsa Indonesia.

“Ini adalah salah satu bentuk upaya dari fpks untuk mengokohkan nasionalisme-religius yang ada pada diri santri-santri, anak-anak kita, ini menjadi penting karena banyaknya pemikiran-pemikiran yang masuk di negeri kita yang bisa merusak karakter asli bangsa kita, dengan kita mengadakan lomba ini muncul semangat nasionalisme sebagaimana yang dimiliki oleh generasi awal kita, semangat bela negara dan memiliki wawasan kebangsaan yang sangat kokoh,” ujar Ketua Majelis Syuro PKS tersebut.



“Tujuan selanjutnya adalah untuk memajukan pesantren sebagai soko guru pendidikan nasional, kembali bagaimana pesantren yang jumlahnya cukup besar di Indonesia terus kita pertahankan, karena dari pesantren itu juga memunculkan pribadi-pribadi muslim, pribadi-pribadi pribumi Indonesia yang memahami bagaimana mencetak kader ke depan Wakil Rakyat yang berjuang untuk menyampaikan dan mewujudkan aspirasi rakyat, memahami apa yang dirasakan masyarakat dibawah”

**HABIB Dr. SALIM SEGAF ALJUFRI, MA**

Ketua Majelis Syuro PKS

## EVENT

fraksi.pks.id | Selasa 5 Desember 2023

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# Tutup Final Lomba Baca Kitab Kuning, Presiden PKS Ajak Santri Bertekad Masuk Parlemen

Jakarta (05/12) — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikh memberikan arahan kepada para santri pada momen penutupan Final Lomba Baca Kitab Kuning ke-VII di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Selasa (05/12).

Dalam sesi penutupan Lomba Baca Kitab Kuning ke-VII, Syaikh meyakinkan para santri bahwa kemampuan membaca kitab kuning yang telah dimiliki dapat menjadi bekal untuk memasuki institusi negara, terutama DPR RI.

“Hadirnya santri-santri akan mewarnai kehidupan institusi negara secara

سابقة قراءة الكتاب فتح المعين

**Final**  
**Lomba Baca**  
**Kitab**  
**Kuning**  
**EDISI VII 2023**  
**FRAKSI PKS DPR RI**

keseluruhan.” ujar Presiden PKS tersebut.

Menurut Syaikh, finalis harus mencanangkan diri dan bertekad menjadi anggota legislatif. Nilai-nilai agama yang melekat dapat membuka wawasan dan menjadi pelengkap agar tidak terdapat kekosongan dalam praktik-

“Dengan membaca kitab-kitab dan buku-buku maka wawasan akan semakin lengkap. Ketika suatu saat harus merumuskan kebijakan, mudah-mudahan kita menghasilkan kebijakan yang telah mempertimbangkan berbagai hal agar memberikan kebaikan bagi masyarakat.”

**H. AHMAD SYAIKHU**  
Presiden PKS

praktik politik.

“Dengan membaca kitab-kitab dan buku-buku maka wawasan akan semakin lengkap. Ketika suatu saat harus merumuskan kebijakan, mudah-mudahan kita menghasilkan kebijakan yang telah mempertimbangkan berbagai hal agar memberikan kebaikan bagi masyarakat.” pungkas Syaikh.

Sebagai penutup, Syaikh menitipkan pesan bahwa sejatinya suatu perubahan haruslah dilakukan secara bersama-sama.



Konsisten Gelar Lomba Baca Kitab Kuning

## Ketua FPKS: Bentuk Komitmen pada Perjuangan Pesantren dan Kiyai

Jakarta (05/12) — Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyatakan komitmen Fraksi PKS dalam mengokohkan nilai-nilai keumatan sekaligus mengingatkan peran pesantren, kiai, dan santri, kepada generasi muda Indonesia.

Salah satu bentuknya, kata Jazuli, ialah dengan penyelenggaraan Lomba Baca Kitab Kuning yang konsisten diadakan tiap tahunnya.

Hal itu disampaikan Jazuli saat memberikan keynote speech dalam acara Final Lomba Baca Kitab Kuning Edisi

“Karena bahasa Arab adalah bahasa surga, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab adalah bahasa hadist, bahasa Arab adalah bahasa literatur-literatur kelslaman yang disusun dan dikarang oleh ulama salafush shalih. Agar kitab bisa mengerti rujukan-rujukan yang original, Al-Quran, hadist, dan literatur-literatur dari salafush shalih, maka kita harus mengerti bangsa Arab. Untuk menstimulasi minat generasi muda terhadap Bahasa Arab tersebut, maka Fraksi PKS menyelenggarakan lomba ini setiap tahun”, pungkasnya.ujar Jazuli.

سابقة قراءة الكتاب فصح المعين

## Final Lomba Baca Kitab Kuning

EDISI VII 2023

FRAKSI PKS DPR RI

VII Tahun 2023 Fraksi PKS DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (05/12)

“Fraksi PKS tetap menjaga konsistensi menyelenggarakan

berbagai macam lomba. Ada lomba yang sifatnya keumatan. Ada lomba yang sifatnya mengokohkan nasionalisme Indonesia. Lomba yang menyangkut keumatan, salah satunya adalah Lomba Baca Kitab Kuning yang sudah tujuh tahun berturut-turut diadakan sejak 2016. Ada pemilu atau pun tidak ada pemilu, Fraksi PKS tetap menyelenggarakan Lomba Baca Kitab Kuning. Artinya, lomba ini bukan untuk kepentingan politik praktis menghadapi pemilu”, ungkap Anggota Komisi I DPR RI ini.

BERIKUTNYA >>>

## Konsisten Gelar Lomba Baca Kitab Kuning, Ketua FPKS: Bentuk Komitmen pada Perjuangan Pesantren dan Kiai

### « SEBELUMNYA

Dalam paparannya, Jazuli menyebut Lomba Baca Kita Kuning ditujukan untuk menyukuri dan menyiarkan Hari Santri Nasional.

“Sebagaimana kita pahami, Hari Santri Nasional dipilih bertepatan dengan resolusi jihad yang dikabarkan oleh Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dan perlu diketahui, pemilihan Hari Santri Nasional disajarkankan dengan Resolusi Jihad Hadratus Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, tidak terlepas, diakui atau tidak, diusulkan oleh kader terbaik PKS, yakni Dr. Hidayat Nur Wahid”, ujar Jazuli.

Jazuli menegaskan peran besar dari pesantren, kiai, dan santri, yang harus terus diperingati dan diteladani oleh bangsa Indonesia.

“Pesantren telah hadir, kiai telah hadir, santri telah hadir, sebelum Republik Indonesia merdeka. Fraksi PKS DPR RI memahami dan menyadari betul kontribusi pesantren, kiai, dan santri sangat besar bagi republik ini, maka kami abadikan salah satunya dengan

Lomba Baca Kitab Kuning. Kami tidak ingin ada mata rantai yang terputus dari peran para kiai, peran santri, dan peran pesantren, yang sudah tertoreh sebelum dan setelah Indonesia ini merdeka”, tegas Anggota DPR RI Dapil Cilegon dan Serang ini.

Terakhir, Jazuli pun menyebut bahwa Fraksi PKS dengan sengaja dan serius melaksanakan Lomba Baca Kitab Kuning ini untuk menanamkan rasa cinta generasi bangsa ini terhadap Bahasa Arab.

“Karena bahasa Arab adalah bahasa surga, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab adalah bahasa hadist, bahasa Arab adalah bahasa literatur-literatur keislaman yang disusun dan dikarang oleh ulama salafush shalih. Agar kitab bisa mengerti rujukan-rujukan yang original, Al-Quran, hadist, dan literatur-literatur dari salafush shalih, maka kita harus mengerti bangsa Arab. Untuk menstimulasi minat generasi muda terhadap Bahasa Arab tersebut, maka Fraksi PKS menyelenggarakan lomba ini setiap tahun”, pungkasnya.



“Fraksi PKS tetap menjaga konsistensi menyelenggarakan berbagai macam lomba. Ada lomba yang sifatnya keumatan. Ada lomba yang sifatnya mengokohkan nasionalisme Indonesia. Lomba yang menyangkut keumatan, salah satunya adalah Lomba Baca Kitab Kuning yang sudah tujuh tahun berturut-turut diadakan sejak 2016. Ada pemilu ataupun tidak ada pemilu, Fraksi PKS tetap menyelenggarakan Lomba Baca Kitab Kuning. Artinya, lomba ini bukan untuk kepentingan politik praktis menghadapi pemilu

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

# Pemenang

## مسابقة قراءة الكتاب فتح المعين Lomba Baca Kitab Kuning

EDISI VII 2023  
FRAKSI PKS  
DPR RI



Diselenggarakan oleh  
**FRAKSI PKS DPR RI**  
Dalam Rangka Peringatan  
Hari Santri Nasional  
Tahun 2023



Peringkat	Provinsi	Pemenang	Nilai	Peringkat	Provinsi	Pemenang	Nilai
Juara 1	<b>DKI Jakarta</b>	Zidan Zulfikri.	761	Harapan 1	<b>Jawa Timur</b>	Alfoun Fajar Mubarak	739
Juara 2	<b>Kalimantan Selatan</b>	Nadir Abrori	760	Harapan 2	<b>Jawa Tengah</b>	Imam Ubaidillah	733
Juara 3	<b>Riau</b>	Rizky Nur Hidayatullah.	757	Harapan 3	<b>DI Yogyakarta</b>	Sifak Saifuddin Ahmad	729



Dialog Kebangsaan Bersama  
Pendeta di Sulut,

## HNW: Kebhinnekaan dan Keberagaman Penguat Indonesia

Manado (22/11) -- Anggota Komisi VIII sekaligus Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW mengatakan sejak awal sejarah berdirinya bangsa dan negara Indonesia, kebhinnekaan termasuk dalam keberagaman memang sudah nyata adanya.

Tetapi kebhinnekaan itu, kata HNW oleh para Bapak dan Ibu Bangsa tidak dijadikan sebagai faktor disharmoni, konflik, pemecah belah, hegemoni mayoritas atau tirani minoritas.

Sebaliknya, keragaman atau kebhinnekaan termasuk dalam hal beragama, di Indonesia malah menghadirkan ketunggal ikaan, yaitu kemampuan untuk saling memberi, menerima, dan menghargai untuk satu kemaslahatan bersama bagi bangsa dan negara Indonesia merdeka.

"Sehingga ketika kita membahas ideologi Pancasila dalam konteks sekarang dan kedepan, sangat penting

menjadikan praktik berBhinneka Tunggal Ika itu sebagai pilar yang juga dipentingkan. Sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar jargon dan cita-cita kosong. Tetapi bagian dari jati diri menasejarah, sesuatu fakta yang nyata adanya dan telah bisa dilaksanakan dengan baik dan benar, dan itu telah menghadirkan satu kesepakatan bersama Indonesia Merdeka dengan dasar Pancasila, UUD 1945, dan bentuk negaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan yang lainnya," kata HNW dalam Dialog

Kerjasama kerjasama MPR dan Forum Musyawarah Pentakosta Solidaritas (F-MPS) Sulawesi Utara, dengan tema 'Merawat Kebhinnekaan dalam Kesatuan Ideologi Pancasila Menuju Masa Depan Indonesia' di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (21/11/2023).

Turut berbicara dalam Dialog Kebangsaan ini pimpinan PKS Sulawesi Utara; Syarifudin Saafa.

Dialog Kebangsaan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Forum Musyawarah Pentakosta Solidaritas (F-MPS) Josely Losa, Ketua F-MPS Victor Anto, mereka menyambut sangat positif kehadiran dan paparan dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, yang berasal dari Partai Islam, PKS.

Turut hadir juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Amir Liputo, Anggota DPRD Kota Manado Nur Amalia, serta ratusan pendeta yang tergabung dalam F-MPS Sulawesi Utara.

HNW mengungkapkan Panitia Sembilan yang menyepakati Piagam Jakarta/ Pembukaan UUD 45 yg didalamnya ada cita-cita mendasar dari Indonesia Merdeka, ada juga dasar negara Pancasila, mencakup dan mewakili seluruh keragaman yang ada di Indonesia, seperti latar belakang suku, agama, partai, ormas, profesi, pendidikan.

Ada empat tokoh dari nasionalis kebangsaan dalam Panitia Sembilan, yaitu

Soekarno, Moh Hatta, Moh Yamin, Achmad Subardjo. Ada kelompok kebangsaan dari kalangan Kristiani yaitu A.A. Maramis.

Ada kelompok nasionalis Islam yaitu KH Wahid Hasyim, KH Kahar Muzakir, H. Agus Salim, H. Abikoesno Tjokrosujoso. Ada yang berasal dari Sumatera, Jawa, Sulawesi.

Ada yang sekolahnya di Indonesia, Belanda, Mesir. Ada yang pendidikannya dari pesantren, pendidikan teknik, ekonomi, hukum.

"Keragaman dalam Panitia Sembilan membuktikan kepada kita bahwa sejak dari awal kebhinnekaan itu sudah nyata adanya. Tetapi dari awal kebhinnekaan menghadirkan tunggal Ika, karena dia memang tidak dijadikan faktor membuat kita terpecahbelah, atau tidak bisa menyepakati dasar negara Indonesia. Karena ketika di BPUPK, 67 anggota belum

sepakat tentang dasar negara. Kesepakatan baru terjadi di Panitia Sembilan," jelas Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.

Menurut HNW, keragaman latar belakang anggota Panitia Sembilan membuktikan bahwa Indonesia memang beragam. Tetapi beragam bukan hanya bhinneka saja, tetapi juga tunggal Ika.

"Itulah makna yang telah diwariskan Bapak dan Ibu Bangsa. Kalau tidak ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang dipraktikkan dan diteladankan oleh para Bapak Bangsa, bisa jadi tidak ada kesepakatan tentang dasar dan ideologi negara, dan bentuk negara Indonesia. Tetapi karena Bapak Bangsa memberikan keteladanan tentang Bhinneka Tunggal Ika, mereka sepakat Republik Indonesia adalah negara kesatuan dan dasar

BERIKUTNYA >>>



## Dialog Kebangsaan Bersama Pendeta di Sulut, HNW: Kebhinekaan dan Keberagaman Penguat Indonesia

### « SEBELUMNYA

negaranya adalah Pancasila.

Bahkan disana juga ada keterlibatan langsung dari 2 Bapak Bangsa asal Sulawesi Utara yaitu AA Maramis di BPUK dan Panitia 9, serta Sam Ratulangi di PPKI," katanya.

HNW menambahkan dalam penyelamatan Indonesia kembali menjadi NKRI pun ada peran tokoh bangsa yang berlatarbelakang berbeda-beda, termasuk organisasi politik keagamaan yang berbeda-beda. Tetapi dengan keragaman itu, para tokoh bangsa bisa menyatukan kembali Indonesia dalam bentuk NKRI melalui Mosi Integral Mohammad Natsir pada 3 April 1950. Sebelumnya Mohammad Natsir (pimpinan Partai Islam Masyumi) menemui Pimpinan Partai Katolik Indonesia I.J. Kasimo dan Pimpinan Partai Kristen Indonesia, A.M. Tambunan.

Partai Katolik Indonesia dan Partai Kristen Indonesia setuju dengan perjuangan M Natsir dari Partai Islam Masyumi itu yang menjadikan Indonesia tidak lagi RIS tapi NKRI.

"Usulan Mosi Integral Moh

Natsir dari Partai Islam Masyumi ini disampaikan di Parlemen RIS pada 3 April 1950. Pimpinan partai Katolik, partai Kristen dan partai-partai lainnya setuju. Kemudian disampaikanlah ke Bung Karno dan Bung Hatta, dan disetujui sehingga pada 17 Agustus 1950 Indonesia diproklamasikan kembali menjadi NKRI," imbuhnya.

"Itulah gambaran tentang NKRI yang sering diteriakkan 'NKRI Harga Mati'. Di balik itu ada perjuangan tokoh-tokoh agama dari Islam, Kristen, Katolik, PNI, PSI bersama tokoh bangsa yang lainnya, bersepakat, sama seperti ketika sebelumnya mereka menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara," sambungnya.

Jadi, lanjut HNW, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI adalah satu fakta sejak dari dulu. Keragaman itu tidak menjadi faktor yang menyekat dan membatasi, bukan berarti tidak bisa bersama-sama, tidak bisa menyepakati membangun bangsa. Malah sebaliknya kita mendapat warisan sejarah bahwa keragaman justru menjadi faktor yang menguatkan Indonesia.

"Apa yang telah dilakukan Bapak Bangsa dan Ibu Bangsa menghadirkan fakta tentang Bhinneka Tunggal Ika yang membuat kita Indonesia bersatu padu, menghadirkan kesepakatan tentang Indonesia merdeka, NKRI, menghadirkan Pancasila sebagai ideologi negara, dan NKRI," katanya lagi.

Maka sudah seharusnya, spirit Bhinneka Tunggal Ika seperti itu bisa dijaga dan diwariskan kepada generasi selanjutnya, generasi yang bertemu dengan peringatan 100 tahun Indonesia Merdeka.

HNW berpendapat penting bagi kita untuk mempelajari keteladanan mensejarah yang telah diwariskan oleh para Bapak dan Ibu Bangsa.

"Sehingga kalau kita mempelajari sejarah, maka kita akan tahu persis siapa kita. Kalau kita tahu siapa kita, ke depan kita sangat mudah untuk mengulang kembali segala capaian positif itu. Sejarah ini perlu kita segarakan kembali. Betapa kesatu paduan umat beragama, bersama tokoh-tokoh kebangsaan lainnya dalam keragaman latar belakang mereka, telah menyelamatkan Indonesia Merdeka, dan NKRI yang mempunyai dasar Pancasila ini. Ini yang perlu terus kita rawat, aktualisasikan dan wariskan, agar benar-benar dapat menjumpai generasi emas pada peringatan 100 tahun Indonesia Merdeka," pungkasnya.



"Keragaman dalam Panitia Sembilan membuktikan kepada kita bahwa sejak dari awal kebhinnekaan itu sudah nyata adanya.

Tetapi dari awal kebhinnekaan menghadirkan tunggal Ika, karena dia memang tidak dijadikan faktor membuat kita terpecah-belah, atau tidak bisa menyepakati dasar negara Indonesia. Karena ketika di BPUK, 67 anggota belum sepakat tentang dasar negara. Kesepakatan baru terjadi di Panitia Sembilan,"

**Dr. H.M. HIDAYAT  
NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI



## Ketua F-MPS Apresiasi HNW yang Hadir Dialog Kebangsaan Bersama Pendeta di Manado

Manado (27/11) --- Pimpinan Forum Musyawarah Pentakosta Solidaritas (F-MPS) dan para pendeta yang tergabung dalam F-MPS memberikan apresiasi dan penghormatan atas kehadiran Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau HNW untuk menyampaikan materi dalam Dialog Kebangsaan yang digelar F-MPS di Manado, pada hari Selasa, (21/11/2023).

Ratusan Pendeta yang mengikuti Dialog Kebangsaan itu menyambut sangat positif kehadiran Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

“Setelah Dialog Kebangsaan, kami para pendeta berkumpul membahas dialog itu. Tanggapan para pendeta yang mengikuti Dialog Kebangsaan itu sangat positif. Mereka sungguh tidak membayangkan bisa bersama-sama dan berdialog dengan Bapak Hidayat Nur Wahid yang merupakan pimpinan lembaga tinggi negara MPR. Apalagi Hidayat Nur Wahid adalah juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang adalah Partai Islam, tapi bersedia datang jauh2 ke Manado, membersamai para Pendeta dalam kegiatan Dialog Kebangsaan,” kata Ketua Umum F-MPS Pendeta Victor Antono dalam keterangannya.

F-MPS bekerjasama dengan MPR RI menggelar Dialog Kebangsaan dengan tema

‘Merawat Kebhinnekaan dalam Kesatuan Ideologi Pancasila Menuju Masa Depan Indonesia’ di Manado, Sulawesi Utara.

Turut berbicara dalam Dialog Kebangsaan yang diikuti ratusan pendeta yang tergabung dalam F-MPS ini adalah Pimpinan PKS Sulawesi Utara, Syarifudin Saafa.

Dialog Kebangsaan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina F-MPS Josely Losa, Ketua Umum F-MPS Victor Antono, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Amir Liputo, anggota DPRD Kota Manado Nur Amalia.

Pendeta Victor Antono lebih lanjut mengungkapkan kenangan soal Dialog Kebangsaan bersama para Pendeta

**BERIKUTNYA >>>**

Pendeta Victor menegaskan bahwa ketokohan Hidayat Nur Wahid sebagai orang beragama tapi terbuka tanpa memilah dan memilih latarbelakang seseorang.

“Kepribadian Bapak Hidayat patut ditiru. Sebagai Wakil Ketua MPR, sebuah lembaga tinggi negara, Bapak Hidayat memberi perhatian kepada kami para pendeta Kristiani yang berhimpun di dalam F-MPS. Pada waktu beberapa bulan sebelumnya, kami pimpinan F-MPS datang ke gedung MPR, meski saat itu sedang reses, tapi Bapak Hidayat bersedia datang ke MPR untuk menemui kami. Kami kagum karena Bapak Hidayat memberikan respon luar biasa kepada kami,” tuturnya.

## Ketua F-MPS Apresiasi HNW yang Hadir Dialog Kebangsaan Bersama Pendeta di Manado

### « SEBELUMNYA

yang telah berjalan dengan baik dan lancar serta interaktif.

“Narasumber Bapak Hidayat Nur Wahid menyampaikan materi tentang kebhinnekaan dan bagaimana melihat Indonesia ke masa depan, dalam semangat meneladani spirit positif bhinneka tunggal ika yg diteladankan dan diwariskan oleh para Bapak Bangsa termasuk yang berasal dari Sulawesi Utara seperti AA Maramin dan Sam Ratulangi. Dialog berlangsung interaktif, para pendeta juga bertanya dengan kritis dan memberikan masukan konstruktif. Bapak Hidayat juga memberikan jawaban yang sangat baik. Itu menjadi kebanggaan bagi kami. Inilah tokoh nasional yang tidak memiliki sekat-sekat dan memberi pandangan inspiratif Indonesia ke depan,” katanya.

Pendeta Victor menambahkan Dialog Kebangsaan itu sama sekali tidak disinggung soal perpolitikan. Para pendeta pun secara bebas bisa menyampaikan berbagai aspirasi.

“Aspirasi yang kami sampaikan dalam Dialog Kebangsaan itu mendapat respon yang

sangat baik. Bahkan, Bapak Hidayat menitipkan kepada anggota Dewan baik dari DPRD Provinsi maupun Kota Manado dari FPKS untuk menjembatani dan mengawal aspirasi itu, misalnya seperti dana hibah untuk gereja. Ini menjadi penghormatan bagi kami. Ternyata di Indonesia masih ada tokoh nasional yang melihat Indonesia ke depan secara positif. Ini patut diteladani,” katanya.

Pendeta Victor menegaskan bahwa ketokohan Hidayat Nur Wahid sebagai orang beragama tapi terbuka tanpa memilah dan memilih latarbelakang seseorang.

“Kepribadian Bapak Hidayat patut ditiru. Sebagai Wakil Ketua MPR, sebuah lembaga tinggi negara, Bapak Hidayat memberi perhatian kepada kami para pendeta Kristiani yang berhimpun di dalam F-MPS. Pada waktu beberapa bulan sebelumnya, kami pimpinan F-MPS datang ke gedung MPR, meski saat itu sedang reses, tapi Bapak Hidayat bersedia datang ke MPR untuk menemui kami. Kami kagum karena Bapak Hidayat memberikan respon luar biasa kepada kami,” tuturnya.

“Beliau menerima kami dengan hangat dan senang hati. Dan, ketika berbicara dan berdialog dengan beliau, responnya luar biasa, beliau ingin membantu kami yang datang dengan membawa beberapa proposal gereja dari Sulawesi Utara. Ketika kami minta untuk membuat Dialog Kebangsaan, saat itu juga Bapak Hidayat langsung menyanggupi. Dan sekarang sudah beliau penuhi.

Sebagai pribadi dan sebagai pendeta dan pimpinan FMPS, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Hidayat Nur Wahid,” imbuhnya.

Pendeta Victor berharap Dialog Kebangsaan bersama dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS itu bisa berlanjut dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya.

“Para Pendeta pengurus F-MPS juga berharap pertemuan tidak berhenti pada Dialog Kebangsaan ini. Bapak Hidayat juga menyanggupi dan siap melanjutkannya. Kami sangat mengapresiasi Bapak Hidayat sebagai tokoh nasional. Mungkin tahun depan, kita bisa mengundang kembali Bapak Hidayat dalam Dialog Kebangsaan yang kedua,” tuturnya.



“Kepribadian Bapak Hidayat patut ditiru. Sebagai Wakil Ketua MPR, sebuah lembaga tinggi negara, Bapak Hidayat memberi perhatian kepada kami para pendeta Kristiani yang berhimpun di dalam F-MPS. Pada waktu beberapa bulan sebelumnya, kami pimpinan F-MPS datang ke gedung MPR, meski saat itu sedang reses, tapi Bapak Hidayat bersedia datang ke MPR untuk menemui kami. Kami kagum karena Bapak Hidayat memberikan respon luar biasa kepada kami,”

**PENDETA VICTOR ANTONO**

Ketua Umum Forum Musyawarah Pentakosta  
Solidaritas (F-MPS)



Gambar : Istimewa

## Dukung Sikap Indonesia di PBB, HNW Minta Pemerintah Tindaklanjuti Berbagai Negara yang ingin Seret Israel ke ICC

Jakarta (02/12) — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mendukung sikap Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan kejahatan Israel di Gaza, Palestina

dan meminta agar pemerintah segera berkoordinasi dengan sejumlah negara dan pihak yang ingin menyeret pemimpin Israel ke Internasional Criminal Court/ICC (Mahkamah Pidana Internasional).

“Sikap tersebut tentu perlu diapresiasi dan didukung, agar peradaban hukum dan tata dunia internasional terselamatkan, kemanusiaan dipenting-

HNW membaca pernyataan resmi Menlu Retno di Majelis Umum PBB yang menyebutkan bahwa Indonesia mendukung upaya untuk meminta pertanggungjawaban Israel, termasuk ke International Court of Justice/ICJ (Mahkamah Internasional). Menurutnya, sikap resmi itu perlu ditindaklanjuti juga dengan langkah yang lebih efektif, yaitu dengan membawa Israel ke ICC, dengan meminta jaksa ICC untuk melakukan penyelidikan dan menyidangkan kejahatan-kejahatan Israel, sebagaimana yang diminta oleh negara-negara lain.

kan, dan kejahatan Israel tersebut tidak kembali terulang, dengan mereka mempertanggungjawabkan kejahatan tersebut di peradilan internasional,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (02/12).

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa untuk membawa Israel dan pemimpinnya ke peradilan internasional memang bukan pekerjaan yang mudah. Namun, hal itu bukan hal yang mustahil dan harus selalu dicoba. Karena semakin brutalnya Israel melakukan kejahatan kemanusiaan di Palestina khususnya di Gaza. Salah satu caranya adalah dengan mendukung dan berkoordinasi

dengan negara-negara anggota PBB yang telah menyampaikan sikap agar Israel dibawa ke ICC.

Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro dan Djibouti. Kelima negara itu adalah negara anggota ICC yang menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma. Sebelumnya, juga diberitakan, Turki, Kolombia dan Aljazair serta sejumlah pihak yang mewakili korban di Gaza juga mengajukan hal serupa.

Langkah tersebut sangat penting didukung, apalagi di tengah upaya PBB memperingati hari solidaritas

## Dukung Sikap Indonesia di PBB, HNW Minta Pemerintah Tindaklanjuti Berbagai Negara yang ingin Seret Israel ke ICC

### « SEBELUMNYA

internasional untuk Palestina, dan upaya PBB mencari solusi mengakhiri kejahatan genosida ini, militer Israel justru semakin membabi buta menyerang Gaza Palestina dari segala penjuru pada Jumat (1/12), setelah jadi kemanusiaan.

Hal ini tentu hanya dapat dihentikan dengan tekanan dunia internasional dan PBB, serta mengupayakan melibatkan ICC dalam mengadili dan menghukum pemimpin Israel yang terlibat dalam genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya di Gaza, Palestina.

Lebih lanjut, HNW membaca pernyataan resmi Menlu Retno di Majelis Umum PBB yang menyebutkan bahwa Indonesia mendukung upaya untuk meminta pertanggungjawaban Israel, termasuk ke International Court of Justice/ICJ (Mahkamah Internasional). Menurutnya, sikap resmi itu perlu ditindaklanjuti juga dengan langkah yang lebih efektif, yaitu dengan membawa Israel ke ICC, dengan meminta jaksa ICC

untuk melakukan penyelidikan dan menyidangkan kejahatan-kejahatan Israel, sebagaimana yang diminta oleh negara-negara lain.

Menindaklanjuti dengan membawa Israel ke ICC lebih cocok untuk mengadili kejahatan Israel. Pasalnya, ICC memiliki yurisdiksi mengadili kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi, yang semuanya sangat jelas terlihat dilanggar oleh Israel dalam invasinya ke Gaza, Palestina beberapa pekan terakhir.

HNW memahami bahwa Indonesia (sebagaimana juga Israel) bukan negara anggota ICC yang telah menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma. Namun, Indonesia seharusnya dapat memberikan dukungan terhadap negara-negara anggota ICC yang telah meminta agar penyelidikan terhadap kejahatan Israel telah dilakukan.

Sebagai negara yang masih menimbang untuk menandatangani Statuta Roma, Indonesia perlu menegaskan bahwa efektivitas ICC diuji dengan kasus Israel ini.

"Apakah mahkamah tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk memberikan keadilan kepada korban kejahatan genosida seperti di Gaza, Palestina? Ini yang ingin dilihat oleh Indonesia dan masyarakat dunia," ujarnya.

HNW mengatakan apabila memang ICC bisa diandalkan untuk mengadili Israel, maka Indonesia perlu mempertimbangkan untuk segera menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma dan menjadi negara anggota ICC.

"Jadi, sebagai negara non anggota ICC, pernyataan-pernyataan tersebut dan komitmen untuk menandatangani Statuta Roma, apabila ICC bisa benar-benar menghukum Israel, yang perlu disampaikan ke masyarakat dunia. Itu semua demi terselamatkannya peradaban dunia, tegaknya hukum berkeadilan, perdamaian dan kemanusiaan," pungkasnya.



Menindaklanjuti dengan membawa Israel ke ICC lebih cocok untuk mengadili kejahatan Israel. Pasalnya, ICC memiliki yurisdiksi mengadili kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi, yang semuanya sangat jelas terlihat dilanggar oleh Israel dalam invasinya ke Gaza, Palestina beberapa pekan terakhir.

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI



**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***